



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**RENCANA KERJA (RENJA)**

**TAHUN**

**2022**

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**KOMPLEKS PERKANTORAN TERPADU MANGGARAWAN**

**JALAN RAYA MANGGAR - GANTUNG DSN. MANGGARAWAN DESA PADANG – KEC. MANGGAR 33516 TELP. 0719-9220049**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian serta kemudahan, keterbukaan pikiran, dan kesehatan yang telah diberikan sehingga tugas-tugas pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik, khususnya selama penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 ini disusun sebagai tindak lanjut dari keluarnya rancangan awal RKPD 2022 Kabupaten Belitung Timur yang telah disampaikan kepada setiap Perangkat Daerah melalui surat edaran kepala daerah dimana sebelumnya telah dilaksanakan musrenbang di tingkat kecamatan.

Dalam menyajikan dokumen Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 ini disadari bahwa masih terdapat keterbatasan dan faktor-faktor kelemahan yang mempengaruhi kemampuan untuk menyajikan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2022 secara lebih optimal. Namun tentunya harapan kami, semoga Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 ini dapat dijadikan barometer dan tolak ukur untuk perbaikan kinerja pada tahun berikutnya, sehingga dapat diambil langkah-langkah melalui transformasi dari proses perencanaan yang strategis dalam pengambilan keputusan untuk kemajuan bersama.

Semoga Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 ini memberi kontribusi dan dapat berguna bagi kemajuan Kabupaten Belitung Timur.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Belitung Timur,



**JDA LISMAWATI, S.Sos, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19711102 200112 2 003



## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	I - 1
1.2 Landasan Hukum .....	I - 3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	I - 9
1.4 Sistematika Penulisan .....	I - 9
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	II - 1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	II - 27
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	II - 40
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	III - 1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	III - 22
3.3 Program dan Kegiatan .....	III - 25
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>IV - 1</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>V - 1</b>
<b>Lampiran</b>	
- Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja	
- Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2020 TRIWULAN IV	
- SK Pembentukan Tim Penyusun Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa TAHUN 2022	
- SK Penetapan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa TAHUN 2022	



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dokumen Renja yang disusun setiap tahunnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belitang Timur Tahun 2022 ditetapkan pada tanggal 07 Juli 2021.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitang Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2021 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitang Timur tahun 2022. Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dalam rangka mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA-PD) Tahun 2022. Mengingat RKPD



merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada.

Dalam prosesnya penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja Perangkat Daerah, yang selaras dengan Renstra Perangkat Daerah.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif Perangkat Daerah;
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun  $n$  dan tahun  $n+1$ .



## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); Pendahuluan | 1.4
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Pendahuluan | I.5 Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
  22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  23. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nondalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
  24. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pangarusutamaan Gender di Daerah. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);  
Pendahuluan | 1.7
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana



- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Infomasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No 1114);
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Berseumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
  34. Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  35. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);
  36. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 85); Pendahuluan | 1.8
  37. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 17);
  38. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat



- Daerah Kabupaten Belitong Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah No 43); dan
39. Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pegarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 17);
  40. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
  41. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;
  42. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4405);
  43. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
  44. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  45. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  46. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  47. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
  48. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) dan diubah dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - Undang;
  49. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  50. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  52. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
  53. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  54. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
  55. Peraturan Menteri Sosial R.I Nomor : 129/HUK/2008 tanggal 06 Nopember 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal ( SPM) Bidang Sosial Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. (permensos 9 2018)
  56. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 44/HUK/2003 tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional;
  57. Peraturan Bupati Belitong Timur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2021 Nomor 28);
  58. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitong Timur;
  59. Peraturan Daerah Nomor 45 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsidan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitong Timur.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitong Timur Tahun 2022 adalah sebagai salah satu upaya dalam rangka pencapaian Visi, Misi dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitong Timur Tahun 2021-2026. Dokumen ini akan menjadi dokumen perencanaan OPD yang diacu untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Beltim dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2022.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitong Timur Tahun 2022 adalah merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama tahun 2022, dan sebagai tolak ukur sampai sejauh mana tingkat pencapaian sasaran program atau kegiatan yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitong Timur Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

###### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD**

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

###### **2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

###### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berisikan uraian mengenai: Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti

dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

#### **3.3 Program dan Kegiatan**

Berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini berisikan rencana kerja dan pendanaan untuk tahun 2022.

### **BAB V PENUTUP**

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya.



## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD

Total Anggaran Belanja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitong Timur pada tahun 2020 sebesar Rp 11.074.520.000,- dengan Total Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 10.123.506.231,- atau sebesar 91,41 %.

Secara global Target kinerja Keuangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitong Timur meliputi Belanja tidak Langsung dan Belanja Langsung, untuk Belanja Tidak Langsung dengan tingkat penyerapan anggaran hingga 93,23% dari total anggaran sebesar Rp 4.353.622.000,- capaian realisasi sebesar Rp 4.058.983.934,- dan untuk Belanja Langsung terdiri 24 (dua Puluh Empat) Program dan 76 (tujuh puluh enam) Kegiatan, dengan tingkat penyerapan anggaran hingga 90,23% dari total anggaran sebesar Rp 6.720.898.000, - capaian realisasi sebesar Rp 6.064.522.297,-. Adapun capaian kinerja (capaian outcome program dan output kegiatan) pada angka 98,22% berarti realisasi kinerja diatas interval  $91\% \leq 100\%$  dengan kriteria penilaian kinerja "**Sangat Tinggi**".

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitong Timur tahun lalu (2020) Evaluasi Renja (Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2020) dapat dilihat pada **Lampiran I**.

Pada tahun 2020 dan 2021 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan Refocusing Anggaran terkait dengan Penanganan Pencegahan Penularan COVID-19 yang mana anggaran tersebut dialihkan ke anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai dengan DPPA 2020 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitong Timur yang ditetapkan pada tanggal 23 April 2020 dan Tahun 2021 pada Tanggal 22 April 2021.

Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitong Timur melaksanakan 17 (tujuh belas) program, 29 (dua puluh Sembilan) Kegiatan dan 79 (Tujuh Puluh Sembilan) Sub kegiatan dengan total Anggaran sebesar Rp 14.463.052.670,-, yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai Sebesar Rp 5.160.708.052,-, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 8.608.481.618,-, Belanja Hibah sebesar Rp 285.000.000,-, Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp 310.025.000,-. Sedangkan Belanja Modal yang terdiri dari Belanja Modal dan Peralatan Mesin sebesar Rp 98.838.000,-.



Pada tahun 2021 DSPMD melakukan Recofusing Anggaran terkait dengan Penanganan Pencegahan Penularan COVID-19 yang mana anggaran tersebut dialihkan anggaran Belanja Tidak Langsung (BTT) sesuai dengan DPPA 2021 DSPMD Kabupaten Belitong Timur yang ditetapkan pada tanggal 22 April 2021. Pada anggaran Pergeseran ini DSPMD Kabupaten Belitong Timur melaksanakan 17 (tujuh belas) program, 29 (dua puluh Sembilan) Kegiatan dan 79 (tujuh puluh sembilan) Sub kegiatan dengan uraian Anggaran pergeseran antara lain sebagai berikut : BELANJA OPERASI sebesar Rp 12.898.389.570,- yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp 5.101.318.052,- Belanja Barang dan Jasa Rp 7.487.046.518,- Belanja Hibah Rp 0,- Belanja Bantuan Sosial Rp 310.025.000,- dan BELANJA MODAL yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 98.838.000,-.

Realisasi anggaran Belanja DSPMD Kabupaten Belitong Timur tahun 2021 secara keseluruhan sampai dengan Triwulan ke II sebesar Rp 4.890.862.684,- (33,82 %) dari total anggaran Rp 12.997.227.570,-.

Dalam evaluasi ini juga diuraikan hal-hal yang mendukung keberhasilan sekaligus hal-hal yang menghambat sehingga menimbulkan kegagalan pencapaian target. Diupayakan pula menginventarisir langkah-langkah antisipatif yang akan dilakukan sehingga kinerja pemerintah semakin baik pada masa-masa yang akan datang. Berdasarkan hasil monev yang disusun tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renstra OPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitong Timur pada TA. 2021 dari seluruh program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdapat dalam 3 (tiga) urusan Wajib maupun urusan rutin OPD. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan II (capaian outcome program dan output kegiatan) pada angka 33,82%, berarti realisasi kinerja diatas interval  $\leq 50\%$  dengan kriteria penilaian kinerja "**Sangat Rendah**", hal ini disebabkan beberapa program, Kegiatan dan Sub Kegiatan masih berproses pelaksanaannya pada Triwulan III dan IV. Evaluasi Renja (Evaluasi Hasil RKPd Tahun 2021) dapat dilihat pada table 2.1 sebagai berikut :



**Tabel 2.1**  
**Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021**  
**TRIWULAN II**

**Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		<b>Semua Bidang</b>																			
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					6,879,930,282										2,735,597,258		39.76%		
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				5,100,468,052											2,136,880,349		41.90%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan (Orang)			38	5,100,468,052	38	804,979,672	38	1,331,900,677					19	2,136,880,349	50.00%	41.90%		
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				79,050,000											33,200,000		42.00%		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				33,550,000			-		33,200,000						33,200,000		98.96%		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				45,500,000			-		-						-		0.00%		
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				541,265,900											140,443,500		25.95%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Jenis)			3	28,496,500	6	6,043,500	-	12,925,000					-	18,968,500	0.00%	66.56%		



**RENJA TAHUN 2022**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITONG TIMUR**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan Perlengkapan kantor yang diadakan (Jenis)					3	64,125,000	6	13,261,000	-	25,656,500					-	38,917,500	0.00%	60.69%
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia (Jenis)					3	1,887,500	6	-	-	1,887,500					-	1,887,500	0.00%	100.00%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Tersedia (Jenis)					3	132,722,500	6	12,819,000	-	50,896,000					-	63,715,000	0.00%	48.01%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (Jenis)					3	33,653,400	6	4,980,000	-	11,975,000					-	16,955,000	0.00%	50.38%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan (Kali)					3	280,381,000	3	-	6	-					6	-	200.00%	0.00%
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							95,848,000										91,140,000		95.09%
		Pengadaan Mebel	jumlah mebel (Unit)					12	27,586,000	3	25,264,000	6	-					6	25,264,000	50.00%	91.58%
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)					12	68,262,000	3	-	6	65,876,000					6	65,876,000	50.00%	96.50%
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah</b>							543,411,000										199,820,909		36.77%
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan Surat Menyurat yang tertangani (Jenis)					12	130,042,500	3	21,049,000	6	35,443,500					6	56,492,500	50.00%	43.44%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							99,180,000		7,337,873		11,536,036						18,873,909		19.03%



**RENJA TAHUN 2022**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITONG TIMUR**

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2021 (%)				
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor (Orang)					12	314,188,500	3	42,970,000	6	81,484,500					6	124,454,500	50.00%	39.61%	
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							519,887,330										134,112,500		25.80%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan Laik Jalan (Unit)					12	354,048,500	3	34,705,000	6	66,336,500					6	101,041,500	50.00%	28.54%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam kondisi baik (Bangunan)					12	137,338,830	3	-	12	16,071,000					12	16,071,000	100.00%	11.70%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							28,500,000		9,750,000		7,250,000						17,000,000		59.65%	
																				<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	53.71%	39.76%
																				<b>Predikat Kinerja</b>	Rendah	Sangat Rendah
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>																				
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>							1,111,966,200											462,695,700		41.61%
		<b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>							20,971,000											-		0.00%



**RENJA TAHUN 2022**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITONG TIMUR**

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2021 (%)			
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang							20,971,000			-		-					-		0.00%
		<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota</b>							1,090,995,200										462,695,700		42.41%
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlatihnya Pekerja sosial Masyarakat (Orang)					76	59,586,700	-		-	44	15,775,200				11	15,775,200	14.47%	26.47%
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan dan Pembinaan SDM TKSK (Orang)					12	103,217,000	3	14,280,000	6	24,990,000					6	39,270,000	50.00%	38.05%
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Antisipasi penanganan permasalahan/ kasus psikososial keluarga (Kasus)					0		-		-						-		0.00%	
			terlaksananya upaya-upaya peningkatan kualitas SDM PSM baru, wksbm dan karang taruna (kegiatan)					1	59,204,000	1	3,764,000	1	30,060,000					1	33,824,000	50.00%	57.13%
			tersedianya PSM dan TKSK yang terampil di Desa, kecamatan dan kabupaten dalam menjangkau permasalahan sosial di masyarakat (PSM)					39		39		39						20		50.00%	



**RENJA TAHUN 2022**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITONG TIMUR**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terciptanya penguatan bagi kelembagaan sosial Masyarakat (Lembaga Sosial)					1		1								1		50.00%	
			terlaksananya upaya-upaya peningkatan kualitas SDM PSM baru, wksbm dan karang taruna (kegiatan)					1	761,022,000	1	135,800,000	1	215,572,000					1	351,372,000	50.00%	46.17%
			tersedianya PSM dan TKSK yang terampil di Desa, kecamatan dan kabupaten dalam menjangkau permasalahan sosial di masyarakat (psm)					39		39		39						20		50.00%	
		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Terlaksananya upaya penyebarluasan informasi dan edukasi tentang penguatan kesejahteraan sosial keluarga (Kali)					0		-		-						-		0.00%	
			Jumlah Antisipasi penanganan permasalahan/ kasus psikososial keluarga (Kasus)					30	107,965,500	30	4,830,000	30	17,624,500					15	22,454,500	50.00%	20.80%
			jumlah antisipasi (1 kegiatan)					1		1		1						1		50.00%	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>																			39.64%	41.61%	
<b>Predikat Kinerja</b>																			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>							28,499,500										-		0.00%



**RENJA TAHUN 2022**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITONG TIMUR**

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2021 (%)	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>						28,499,500											-	0.00%	
		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal						28,499,500		-									-	0.00%	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>																			0.00%	0.00%	
<b>Predikat Kinerja</b>																			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>						718,050,700											346,845,100	48.30%	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantii Sosial						444,937,800											275,891,000	62.01%	
		Penyediaan Permakanan	Tersedianya Kebutuhan Permakanan (Orang)					0		-									-	0.00%	
			angka lanjut usia terlantar (lansia)					100		100									50	50.00%	
			persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan tanggap darurat bencana daerah kabupaten (%)					0		-									64,178,000	100.00%	
																			-	0.00%	



**RENJA TAHUN 2022**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITONG TIMUR**

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2021 (%)			
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Penyediaan Sandang	angka lanjut usia terlanjar (lansia)					50		50		50					25		50.00%		
			terpenuhnya kebutuhan dasar lanjut usia terlanjar di luar panti, terpenuhnya kebutuhan dasar anak terlanjar diluar panti (%)					0	49,623,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
		Penyediaan Alat Bantu	Tersedianya Alat Bantu (Paket)					0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%		
			angka lanjut usia terlanjar terpenuhnya kebutuhan dasar lanjut usia terlanjar diluar panti (lansia)					110	63,542,300	110	-	110	62,657,000				55	62,657,000	50.00%	98.61%	
			terpenuhnya 100% kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlanjar di luar panti (%)					0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%		
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial (Orang)					0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%		
			angka lanjut usia terlanjar (lansia)					957	104,691,500	-	4,760,000	-	8,330,000				-	13,090,000	0.00%	12.50%	
			angka lanjut usia potensial terpenuhnya kebutuhan dasar lanjut usia terlanjar di luar panti (UEF)					4		4		4					2		50.00%		
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlanjar, Anak Terlanjar, Lanjut Usia Terlanjar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kepada keluarga (Kecamatan)					0	41,527,000	-	4,760,000	-	9,830,000				-	14,590,000	0.00%	35.13%	



**RENJA TAHUN 2022**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITONG TIMUR**

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2021 (%)			
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			terlaksananya pelayanan dan perlindungan sosial terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia terlanjar di luar panti (%)				100			35		35					18		17.50%		
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah anak/siswa penerima PMTAS terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlanjar di luar panti (350 siswa )				350		121,376,000	350		13,450,000	350		107,926,000		175		121,376,000	50.00%	100.00%
			terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlanjar di luar panti (%)				100			100			100				50			50.00%	
		<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>							273,112,900									70,954,100		25.98%	
		Penyediaan Permakanan	terselenggaranya pembinaan dan pendampingan keluarga eks psikotik luar panti dan home visit (%)				100		27,280,500	-		-	-		-		-		-	0.00%	0.00%
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial (Kecamatan)				0			-		-	-		-		-			0.00%	
			terlaksananya pelayanan dan perlindungan sosial terselenggaranya pembinaan dan pendampingan keluarga eks psikotik luar panti dan home visit , terlatihnya dan terampilnya FM, KAT dan PMKS lainnya (%)				100		59,925,500	22		4,830,000	22		8,452,500		11		13,282,500	11.00%	22.17%



**RENJA TAHUN 2022**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITANG TIMUR**

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2021 (%)			
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kepada keluarga (Kecamatan)					7	20,370,300	7	-	7	7,495,300					4	7,495,300	50.00%	36.80%
			terselenggaranya penyuluhan napza dan pendamping eks napza (peserta)					0		-	-	-						-		0.00%	
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	terlaksananya pelayanan terpadu kepada masyarakat (%)					100	9,042,300	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terlaksananya Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar (Layanan)					0		-	-	-						-		0.00%	
			jumlah posyandu yang di bina (posyandu)					134	47,707,000	134	-	134	43,108,000					67	43,108,000	50.00%	90.36%
			terlaksananya pelayanan terpadu kepada masyarakat (orang)					100		100		100						50		50.00%	
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terlaksananya pelayanan Reunifikasi Keluarga (Layanan)					0	49,445,500	-	-	-	7,068,300					-	7,068,300	0.00%	14.30%
			terlaksananya pengiriman bagi korban Napza, ABH, dan PMKS lainnya (%)					100		14		14						7		7.00%	



**RENJA TAHUN 2022**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITONG TIMUR**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pemberian Layanan Rujukan	terlaksananya pelayanan terpadu kepada masyarakat terselenggaranya pembinaan dan pendampingan keluarga eks psikotik luar panti dan home visit (%)					100	59,341,800	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%
										<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>										13.33%	48.30%
										<b>Predikat Kinerja</b>										Sangat Rendah	Sangat Rendah
		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>							1,149,524,545									299,879,300		26.09%	
		<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>						87,418,750										2,000,000		2.29%	
		Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya Pelayanan dan Perlindungan sosial bagi anak terlantar, anak yang membutuhkan perlindungan khusus dan anak nakal (Orang)					0	16,449,400	-	-	2,000,000						2,000,000		0.00%	12.16%
			terlaksananya pelayanan dan perlindungan sosial, bagi anak terlantar, anak yang membutuhkan perlindungan khusus dan anak nakal (%)					100		-	12							3		3.00%	
		Rujukan Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya Rujukan Anak- anak Terlantar (Orang)					0		-	-							-		0.00%	
			terlaksananya pelayanan dan perlindungan sosial, bagi anak terlantar, anak yang membutuhkan perlindungan khusus dan anak nakal (%)					100	54,119,600	-	-							-		0.00%	0.00%



**RENJA TAHUN 2022**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITONG TIMUR**

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2021 (%)				
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Termutakhirnya basis data terpadu Kesejahteraan sosial (DTKS) (Kali)			100	16,849,750	-	-	-	-							-	-	0.00%	0.00%	
		<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>					1,062,105,795											297,879,300			28.05%	
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar (Kecamatan)			0		-	-									-	-	0.00%		
			Termutakhirnya basis data terpadu Kesejahteraan sosial (DTKS) (Kali)			0		-	-									-	-	0.00%		
			jumlah penerima PKH untuk mengikuti sosialisasi dan penyuluhan (kegiatan)			1	384,636,495	1	-	1	1	124,433,500						124,433,500			50.00%	32.35%
			jumlah keluarga sasaran yang memperoleh penguatan kapasitas dan pendamping meningkatnya aparatur penyedia layanan program penanggulangan kemiskinan (bulan)			12		3			6							6			50.00%	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Aplikasi (Aplikasi)			0		-	-									-	-	0.00%		
			meningkatnya aparatur penyedia layanan program penanggulangan kemiskinan (%)			100	354,535,300	2	4,910,000	22	22	74,510,800						24	79,420,800	24.00%	22.40%	
			termutakhirnya basis data terpadu (BDT) kab. belitong timur (bulan)			12		3			6							6			50.00%	





**RENJA TAHUN 2022**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITONG TIMUR**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Tersedianya kebutuhan dasar bagi kelompok Rentan (Paket)					100	151,917,000	-	-	100	25,387,500					25	25,387,500	25.00%	16.71%
		Pelayanan Dukungan Psikososial	Tersedianya Pelayanan dan dukungan Psikososial (Orang)					100		-	-	-						-		0.00%	
			persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan tanggap darurat bencana (%)					100	8,728,500		-							32		32.00%	0.00%
		<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>							697,124,950										256,419,500		36.78%
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	jumlah pengurus kampung siaga bencana (KSB) (pengurus)					0	28,825,450	-	-	-						-		0.00%	0.00%
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terselenggaranya operasional pelayanan dan penanggulangan bencana Kabupaten (Orang)					0		-	-	-						-		0.00%	
			angka kejadian bencana sosial yang telah terjadi dan potensi yang akan datang jumlah kesiapsiagaan team satgas (orang)					70	668,299,500	70	95,910,000	70	160,509,500					35	256,419,500	50.00%	38.37%
			jumlah personil tagana yang akan dilatih dan diberdayakan (orang)					76		70		70						35		46.05%	
			jumlah sarana prasarana yang memadai (%)					100		-		-						-		0.00%	





**RENJA TAHUN 2022**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITONG TIMUR**

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2021 (%)			
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			jumlah rapat koordinasi pokja PUG dan Focal Point PUG (rakor)					3		1		2					3		100.00%		
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	terlatihnya perangkat teknis terkait PPRG (jumlah peserta) (OPD)					0	35,000,000	-	4,760,000	-	9,830,000				-	14,590,000	0.00%	41.69%	
			jumlah peserta pendidik dan pelatihan gender (peserta)					50		50		50					25		50.00%		
		<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>							281,487,000									111,740,126		39.70%	
		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	tersosialisasikannya aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan peran perempuan (jumlah peserta perempuan) (Kegiatan Hari Besar Perempuan)					0		-		-					-		0.00%		
			jumlah desa prima percontohan (desa)					1	243,981,000	1	9,820,000	1	101,920,126				1	111,740,126	50.00%	45.80%	
			jumlah kegiatan hari besar (kegiatan)					2		-		1					1		50.00%		
			jumlah organisasi perempuan yang di bina (organisasi)					3		3		3					2		50.00%		
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	jumlah peserta pelatihan (peserta)					50	37,506,000	-	-	-	-				-		0.00%	0.00%	



**RENJA TAHUN 2022**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITONG TIMUR**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
				K	Rp	K	Rp	K		Rp		I		II		III		IV		12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>																			
		<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>																			
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Layanan)			0	26,695,000	-	-												
			jumlah penanganan perempuan dan anak korban kekerasan (%)			100		-	6												
		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>																			
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah penanganan perempuan dan anak korban kekerasan (%)			100	85,494,950	-	-												
			jumlah tenaga terlatih untuk korban pendamping KDRT (orang)			12		-	-												







**RENJA TAHUN 2022**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITONG TIMUR**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)			
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah penanganan perempuan dan anak korban kekerasan (%)					100	24,225,000	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%
		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>							21,739,000										5,053,500		23.25%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah penanganan perempuan dan anak korban kekerasan (%)					100	21,739,000	12	-	23	5,053,500					35	5,053,500	35.00%	23.25%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>																			16.55%	10.99%	
<b>Predikat Kinerja</b>																			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>																					
		<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>							99,699,950										-		0.00%
		<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>							99,699,950										-		0.00%
		Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Terfasilitasinya Tata wilayah Desa (Desa)					0		-		-							-		0.00%
			terlaksananya pembinaan penyelenggaraan desa terkoordinasi (desa)					39	45,100,000	-	-	-						-		0.00%	



**RENJA TAHUN 2022**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITONG TIMUR**

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2021 (%)			
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Terfasilitasinya Penataan Kewenangan Desa (Desa)			0		-		-					-				0.00%		
			terlaksananya pembinaan penyelenggaraan desa yang terkoordinasi (desa)			39	54,599,950	-		-					-				0.00%	0.00%	
								<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												0.00%	0.00%
								<b>Predikat Kinerja</b>												Sangat Rendah	Sangat Rendah
		<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>					88,582,300											13,502,500		15.24%	
		<b>Fasilitasi Kerja sama antar Desa</b>					88,582,300											13,502,500		15.24%	
		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Desa)			0		-		-					-				0.00%		
			terlaksananya pembinaan penyelenggaraan desa yang terkoordinasi (desa)			39	47,321,500	39	4,910,000	39	8,592,500				20			13,502,500	50.00%	28.53%	
		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Desa)			0		-		-					-				0.00%		
			terlaksananya pembinaan penyelenggaraan desa yang terkoordinasi (desa)			39	41,260,800	-		-					-				0.00%	0.00%	
								<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												0.00%	15.24%
								<b>Predikat Kinerja</b>												Sangat Rendah	Sangat Rendah
		<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>					1,476,871,650											245,780,000		16.64%	





**RENJA TAHUN 2022**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITONG TIMUR**

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi								Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Terlaksananya evaluasi dan pengawasan Peraturan desa (Desa)					0	46,409,650	-	4,760,000	-	8,330,000					-	13,090,000	0.00%	28.21%
			jumlah desa yang mendapatkan pelatihan tentang hukum desa (desa)					39		-		-						-		0.00%	
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan Bum Desa dan Bum Desa Bersama (Desa)					0	172,560,500	-	4,830,000	-	20,113,500					-	24,943,500	0.00%	14.45%
			jumlah calon bumdes yang mengikuti pelatihan (siswa magang dan UEF)					7		-		-						-		0.00%	
		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Desa)					0	42,105,800	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%
			jumlah desa yang melaksanakan pilkades (desa)					22		-		-						-		0.00%	
		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terfasilitasinya Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Desa)					0	17,399,900	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%
			jumlah desa yang melaksanakan pilkades (desa)					22		-		-						-		0.00%	
		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	terfasilitasinya Penyusunan Profil Desa (Desa)					0	17,066,500	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%
			cakupan desa yang terlayani (desa)					39		-		-						-		0.00%	







Berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan II Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitong Timur sesuai tabel 2.1 diatas, untuk urusan wajib bidang Sosial, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara periodik realisasi kinerja dalam rangka target capaian kinerja Renstra sampai dengan akhir periode Renstra Tahun 2021 masih disebut wajar sesuai pendekatan *money follow function* artinya fungsi-fungsi yang berada pada masing-masing unit/satuan kerja di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitong Timur sudah dilaksanakan sesuai dengan alokasi anggaran yang ada. Meskipun program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara wajar, tetapi untuk mencapai target kinerja Renstra sampai dengan akhir periode Renstra Tahun 2021 masih diperlukan upaya-upaya perencanaan dan penganggaran yang lebih efektif dan efisien.

## **2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitong Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Belitong Timur Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitong Timur.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitong Timur merupakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe A, sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang sosial, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat daerah (OPD). Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **2.2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN**

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang sosial, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;



- b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **2.2.2 STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitong Timur dijabarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 45 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitong Timur.

Sesuai amanat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk setiap Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka sesuai Instruksi Gubernur dikeluarkan Peraturan Bupati Belitong Timur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Belitong Timur.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :

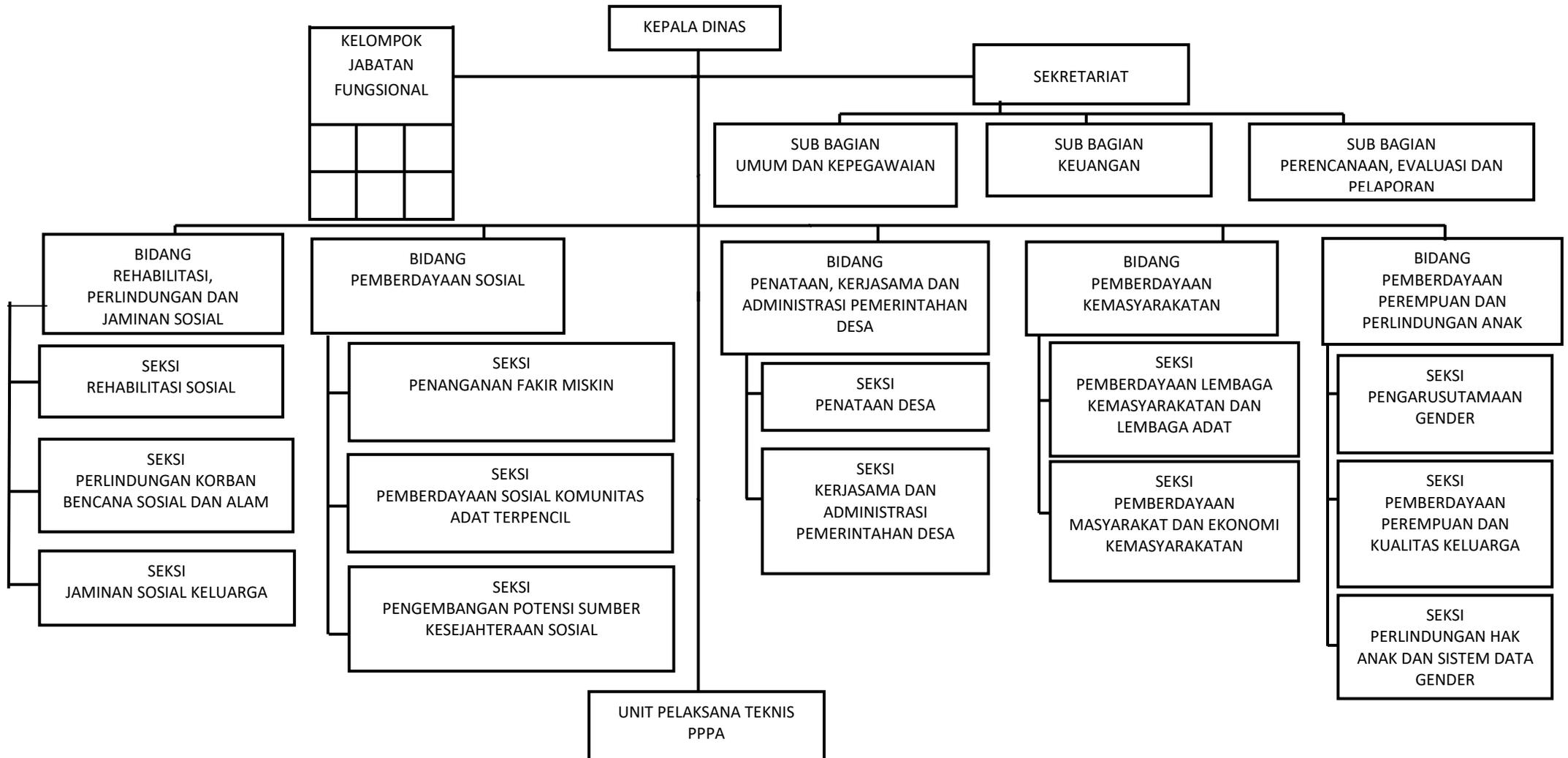
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat Dinas, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan
  - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga, terdiri dari :
  - a. Seksi Rehabilitasi Sosial;
  - b. Seksi Perlindungan Korban Bencana Sosial dan Alam; dan
  - c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.



4. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
  - a. Seksi Penanganan Fakir Miskin;
  - b. Seksi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial; dan
  - c. Seksi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
5. Bidang Penataan, Kerja Sama dan Administrasi Pemerintahan Desa, terdiri dari:
  - a. Seksi Penataan Desa; dan
  - b. Seksi Kerja Sama dan Administrasi Pemerintahan Desa.
6. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan, terdiri dari :
  - a. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat; dan
  - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kemasyarakatan.
7. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
  - a. Seksi Pengarusutamaan Gender;
  - b. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga; dan
  - c. Seksi Perlindungan Hak Anak dan Sistem Data Gender.
8. Kelompok Jabatan Fungsional
9. Unit Pelaksana Tehknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Pelaksana; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional

### **2.2.3 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**

**SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
(TIPE A)**





#### **2.2.4 ANALISA KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITONG TIMUR**

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2020, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Belitong Timur berupa Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitong Timur, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2020 serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Pemerintah Kabupaten Belitong Timur telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Adapun penjelasan mengenai indikator yang mewakili capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitong Timur, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Belitong Timur**  
**Tahun 2020**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
1	Terwujudnya peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dari aspek kelembagaan, SDM, Ketatalaksanaan dan Keuangan Daerah	1	Persentase keikutsertaan pegawai dalam diklat/bimtek peraturan perundang-undangan	persen	100	100	100.00
		2	Persentase ketersediaan administrasi perkantoran, dan perjalanan dinas luar daerah	persen	100	100	100.00
		3	Persentase ketersediaan sarana, prasarana, dan pemeliharaan kantor	persen	100	100	100.00
		4	Tingkat kedisiplinan aparaturnya dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	persen	100	0.00	0.00
2	Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	5	Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	persen	100	100	100
		6	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	persen	17	71,41	420,06
		7	PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)	persen	20.00	73,25	366,25
		8	PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)	persen	15.00	100	666.67
3	Teratasinya berbagai permasalahan sosial yang terjadi.	9	Persentase Peningkatan Akses, Kemudahan dan Jangkauan Rumah Tangga Miskin	persen	100	97,29	97,29
		10	Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Keluarga Sasaran	persen	100	99.80	99.80
4	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pemerintahan Desa dan Masyarakat Perdesaan;	11	Persentase Aparatur Desa yang Meningkatkan Kapasitasnya	persen	100	100	100
		12	Persentase penyusunan dan pengelolaan keuangan desa yang terfasilitasi	persen	100	100	100
		13	PKK aktif	pkk	47	47	100
		14	Posyandu aktif	posyandu	133	134	100.75
		15	Profil desa sesuai standar	desa	39	39	100
		16	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	kelompok	4	4	100
5	Terwujudnya kesetaraan gender dan terlaksananya fasilitasi	17	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	persen	55.00	52.39	95.26
		18	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	persen	50.00	47.70	95.40



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
	Perlindungan Perempuan dan Anak	19	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	persen	100	100	100
		20	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	persen	54.00	35.76	66.21
		21	Rasio KDRT	persen	3:1000	11:36619	9.18
6	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Usaha Ekonomi Perdesaan dan Sosial Budaya Masyarakat.	22	Desa yang menyusun RKPDes pertahun	desa	39	39	100
		23	Persentase BUMDes Yang Terbentuk	Bumdes	39	39	123.33
		24	Posyantek Aktif	posyantek	4	2	66.67

Sumber data : Renstra Perubahan 2016-2021 dan LKJ DSPMD Tahun 2020

### 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD

Isu strategis dalam pelaksanaan tupoksi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitong Timur berdasarkan analisis dari berbagai sumber, Beberapa permasalahan yang perlu ditangani pada tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

#### 1. Permasalahan Pokok

##### a. Permasalahan Bidang Sosial

1. Masih kurangnya partisipasi dan pengetahuan masyarakat untuk melaporkan kejadian pengangkutan anak sesuai prosedur;
2. Belum optimalnya pelayanan rehabilitasi dasar bagi penyandang disabilitas telantar, lanjut usia telantar, anak telantar di luar panti, anak yang berhadapan dengan hukum, tuna sosial, korban penyalahgunaan NAPZA, eks tuna susila, dan eks binaan lembaga permasyarakatan;
3. Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal;
4. Kurangnya partisipasi masyarakat dan aparaturnya dalam menjaring masyarakat yang belum memiliki jaminan sosial;
5. Tidak adanya data pekerja migran (luar daerah) musiman pada perusahaan-perusahaan swasta baik di tingkat desa maupun kecamatan;
6. Rendahnya kualitas sumber Daya manusia potensi sumber kesejahteraan sosial dalam menghadapi masalah sosial;
7. Adanya ketidaksesuaian data penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan/keluarga sasaran yang ditetapkan oleh Pusdatin dengan usulan yang disampaikan oleh Kepala daerah.



**b. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :**

1. Kelembagaan yang memfasilitasi pelayanan PPPA masih minim dan pemberdayaan masyarakat terhadap penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak belum maksimal;
2. Belum adanya Kebijakan pemerintah sebagai payung hukum yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan kegiatan;
3. Belum maksimalnya penerapan anggaran responsive gender untuk mendorong pelaksanaan PUG.

**c. Permasalahan terkait Masyarakat dan Desa :**

1. Masih kurangnya data base perkembangan desa sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan kegiatan;
2. Belum optimalnya pembinaan kepada masyarakat terkait pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa;
3. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa;
4. Kurang optimalnya pengelolaan sumber daya alam desa yang berkelanjutan;
5. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penggunaan Teknologi Tepat Guna (TTG);
6. Kurangnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
7. Kurangnya Kuantitas Sumber daya Manusia pada Bidang PKSA;
8. Rentang kendali dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa yang hanya dilaksanakan pada 1 (satu) Bidang.

Isu-isu Strategis yang berkaitan dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

**2. Isu Strategis**

❖ **Bidang Sosial**

Isu strategis bidang sosial diurutkan sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan dan rehabilitas sosial dasar bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia berupa peningkatan aksesibilitas dan perdayagunaan;
2. Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial dasar, perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hokum;



3. Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial dan pendayagunaan, serta jaminan sosial bagi tuna sosial, korban penyalahgunaan NAPZA, eks tuna susila, dan eks binaan lembaga permasyarakatan;
4. Peningkatan sumber daya manusia dalam pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota;
5. Banyaknya Pekerja migran (luar daerah) musiman;
6. Pemberian bantuan sosial yang belum tepat sasaran;
7. Kurangnya pemahaman Sumber Daya manusia PSKS terhadap peran mereka dalam penanganan masalah-masalah sosial.

❖ **Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**

Isu strategis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa diurutkan sebagai berikut :

1. Data base perkembangan desa sebagai bahan penyusunan rencana kerja program dan kegiatan;
2. Optimalisasi pembinaan masyarakat terkait lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa;
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa;
4. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam desa untuk keberlangsungan kegiatan ekonomi masyarakat desa;
5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penggunaan Teknologi tepat Guna (TTG) di pedesaan;
6. Dibentuknya Tim koordinasi terpadu dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
7. Pembinaan dalam pengelolaan Keuangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terjadwal dan berkesinambungan.

❖ **Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Isu strategis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan terdapat lima kelompok permasalahan, dapat diurutkan sebagai berikut :

- a. Koordinasi perangkat daerah kabupaten dalam integrasi pengarusutamaan gender (PUG) di Kabupaten Belitong Timur;
- b. Adanya respon berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta dalam menjembatani kasus-kasus terhadap perempuan dan anak;
- c. Peningkatan kegiatan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam bentuk sosialisasi ke masyarakat sehingga



meningkatkan pengetahuan perempuan tentang hak-hak perempuan dan anak;

- d. Implementasi peraturan daerah tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- e. Mengoptimalkan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran Responsif Gender (PPRG) dengan pendekatan 'three end' sebagaimana tertuang didalam RPJM 2022-2026 (Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015).



### 3. Prioritas Program dan Kegiatan

Prioritas Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitong Timur pada tahun 2022 antara lain diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Program dan Kegiatan Prioritas**  
**Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Kabupaten Belitong Timur Tahun 2022**

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (N)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Misi-I	MEMBENAH MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KETATAPEMERINTAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR AGAR BERJALAN SESUAI DENGAN ASAS UMUM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK				
Tujuan-2	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Efektif Dan Efisien		Indeks Pelayanan Publik	3,35	
Sasaran-4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik		Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	72	
Sasaran Renstra	Terwujudnya Kualitas Pemerintahan Desa dan Masyarakat Perdesaan	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Persentase Desa yang memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan (%)	100	3.007.673.000
		PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase usulan penataan desa yang ditindaklanjuti (%)	100	60.000.000
		Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa (Persen)	100	60.000.000



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (N)	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Peserta yang mengikuti Pembentukan, penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan status desa (Peserta)	-	-
	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Dokumen yang Terasilitasi Penamaan dan Kode Desa (Dokumen)	-	-
	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Penataan Kewenangan Desa yang difasilitasi (Desa)	39	30.000.000
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang difasilitasi (Desa)	-	-
	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Tata wilayah Desa yang difasilitasi (Desa)	39	30.000.000
	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang difasilitasi terkait Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota (Desa)	-	-
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	<b>Persentase kerjasama antardesa terlaksana (%)</b>	<b>100</b>	<b>70.000.000</b>
	<b>Fasilitasi Kerja sama antar Desa</b>	<b>Persentase kerjasama antardesa terlaksana (Persen)</b>	<b>100</b>	<b>70.000.000</b>
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang difasilitasi melakukan Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga (Desa)	39	35.000.000
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang difasilitasi melakukan Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten (Desa)	39	35.000.000
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Peserta yang Terasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Peserta)	-	-
	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase desa yang memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan (%)</b>	<b>100</b>	<b>2.877.673.000</b>



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (N)	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Persen)</b>	<b>100</b>	<b>2.877.673.000</b>
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen yang terfasilitasi Penyusunan Profil Desa (Dokumen)	39	15.000.000
	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen yang Terlaksana dan evaluasi pengawasan Peraturan desa (Dokumen)	39	35.000.000
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen yang Terfasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	39	40.000.000
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Peserta yang Terbina Peningkatan Kapasitas Anggota BPD (Peserta)	-	-
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang difasilitasi (Desa)	39	12.000.000
	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah desa yang melaksanakan penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota (Desa)	-	-
	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan musyawarah Desa (Desa)	39	55.000.000
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang difasilitasi (Desa)	39	800.000.000
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Terfasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	-	-
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa yang terfasilitasi (Desa)	39	100.000.000
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah desa yang menyelenggarakan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Desa)	18	1.560.300.000



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (N)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Terfasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa (Dokumen)	-	-
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan yang terfasilitasi (Desa)	-	-
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah desa yang dibina dalam Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa (Desa)	39	120.000.000
		Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Manajemen Pemerintahan Desa yang difasilitasi (Desa)	-	-
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Bum Desa dan Bum Desa Bersama yang mendapat pembinaan dan pemberdayaan (Bum Desa dan Bum Desa Bersama)	41	140.373.000
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Desa)	-	-
		Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen yang Terfasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	-	-
<b>Sasaran Renstra</b>	<b>Terwujudnya Kualitas dan kuantitas Usaha Ekonomi Perdesaan dan sosial Budaya Masyarakat</b>		<b>Persentase kerjasama antardesa terlaksana dan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Masyarakat Hukum Adat Yang Diberdayakan (%)</b>	<b>100</b>	<b>825.627.000</b>
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Yang Diberdayakan (%)</b>	<b>100</b>	<b>825.627.000</b>



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (N)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota (Persen)</b>	100	825.627.000
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Desa Yang Menganangkan BBGRM Tingkat Kabupaten (Desa)	-	-
		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Posyandu yang dibina (Posyandu)	133	30.000.000
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna yang difasilitasi (Desa)	39	140.000.000
		Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat (Desa)	-	-
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga yang difasilitasi (TP PKK)	47	570.864.300
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan fasilitasi dalam pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (Desa)	39	44.762.700



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (N)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Fasilitasi Penyelenggaraan Kefentraman, Keterlibatan dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Penyelenggaraan Ketentraman, Keterlibatan dan Perlindungan Masyarakat Desa yang difasilitasi (Desa)	-	-
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Desa yang mengikuti Pelatihan tentang penataan Kelembagaan Desa (Desa)	39	40.000.000
<b>Sasaran Renstra</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>Indeks Kepuasan Layanan Penunjang (Nilai)</b>	<b>88,31 - 100 : A</b>	<b>6.542.212.298</b>
			<b>Nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)</b>	<b>B &gt;60-70</b>	
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan (Persentase)</b>	<b>100</b>	<b>6.542.212.298</b>
		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase perencanaan kinerja yang disusun sesuai standar (Persen)</b>	-	-
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja yang disusun (Dokumen)	-	-
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelaporan Keuangan dan Aset yang disusun sesuai standar (Persen)</b>	<b>100</b>	<b>5.100.468.052</b>
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan (Orang)	44	5.100.468.052
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase aparatur yang berkinerja baik (Persen)</b>	<b>100</b>	<b>59.150.000</b>
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti BIMTEK (Orang)	2	25.500.000
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapan yang tersedia (Stel)	33	33.650.000



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (N)	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasana disiplin pegawai yang tersedia (Set)	-	-
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Persen)</b>	<b>100</b>	<b>419.082.500</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Tersedia (Jenis)	20	123.732.500
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu (Kali)	-	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia (Jenis)	5	1.887.500
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikelola SKPD (Layanan)	-	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia bagi pegawai (buku)	-	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan Perlengkapan kantor yang diadakan (Jenis)	30	57.675.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis yang Tertata (Arsip)	-	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (Jenis)	4	26.910.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Jenis)	18	28.496.500
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan (Kali)	7	180.381.000



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (N)	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase paket pengadaan barang &amp; jasa yang dilaksanakan sesuai SOP (Persen)</b>	<b>80</b>	<b>95.848.000</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional arau lapangan yang tersedia (Unit)	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya (Unit)	-	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (jenis)	-	-
	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel (Jenis)	2	27.586.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)	3	68.262.000
	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor (Unit)	-	-
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya (Unit)	-	-
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor (Persen)</b>	<b>100</b>	<b>506.571.000</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan Surat Menyurat yang tertangani (Jenis)	3	130.042.500
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor (Orang)	80	285.748.500
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan lainnya yang terpenuhi (Jenis)	6	90.780.000



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (N)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Persen)</b>	<b>80</b>	<b>361.092.746</b>
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam kondisi baik (Unit)	6	4.834.246
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Laik Jalan (Unit)	17	327.758.500
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah tanah yang terpelihara (Tanah)	-	-
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin dalam Kondisi Baik (Unit)	-	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara (Unit)	-	-
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel dalam Kondisi Baik (Unit)	-	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara (Unit)	2	28.500.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan Laik Jalan (Unit)	-	-
<b>Sasaran-5</b>	<b>Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (SPBE)</b>		<b>Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</b>	<b>2,70</b>	
<b>Sasaran Renstra</b>	<b>Meningkatnya pengelolaan sistem data gender dan anak</b>		<b>Persentase Pengelolaan sistem Data Gender dan anak yang tersedia</b>	<b>100</b>	<b>150.000.000</b>



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (N)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	Persentase Dokumen data gender yang tersedia	100	150.000.000
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen data gender yang tersedia (Persen)	100	150.000.000
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen data gender dan anak yang Tersedia (Dokumen)	1	150.000.000
<b>Misi-III</b>	<b>PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT BELITUNG TIMUR DAN PENGENTASAN KEMISKINAN</b>				
<b>Tujuan-3</b>	<b>Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat</b>				
<b>Sasaran-16</b>	<b>Menurunnya tingkat kemiskinan</b>		<b>Indeks Kedalaman Kemiskinan</b>	<b>0,642</b>	
			<b>Indeks Keparahan Kemiskinan</b>	<b>0,16</b>	
<b>Sasaran Renstra</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</b>	<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL</b>	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan (%)	100	1.049.719.200
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	Persentase penyaluran uang atau barang hasil pengumpulan kepada masyarakat yang membutuhkan (Persen)	100	1.022.625.200
			Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan (%)	100	
		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyaluran uang atau barang hasil pengumpulan kepada masyarakat yang membutuhkan (Persen)	100	-



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (N)	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan izin Undian Gratis Berhadiah dan pengumpulan Uang (Rakor)	-	-
	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan (Persen)</b>	<b>100,00</b>	<b>1.022.625.200</b>
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan SDM TKSK yang dibina (Orang)	7	89.250.000
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Antisipasi penanganan permasalahan/ kasus psikososial keluarga (Kasus)	36	69.222.500
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja sosial Masyarakat yang tersedia (Orang)	40	757.122.000
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penguatan bagi kelembagaan sosial Masyarakat (Lembaga Sosial)	55	49.826.700
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan sosial Keluarga (E-Warung)	65	57.204.000
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>Jumlah Keluarga yang terlayani (Keluarga)</b>	<b>50</b>	<b>27.094.000</b>



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (N)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		<b>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Keluarga yang terlayani (Persen)	100	27.094.000
		Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang terlayani (Keluarga)	50	27.094.000
Sasaran-17	Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial		Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial		
Sasaran Renstra	Berkurangnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL</b>	PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar ('%)	96,98	2.356.343.338
		<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang terfasilitasi ('%)	100	28.099.500
		<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal (Persen)	100	28.099.500
		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan yang difasilitasi (Orang)	5	28.099.500



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (N)	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang Mendapat Pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti (%)</b>	<b>100</b>	<b>507.044.700</b>
	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial" (Persen)</b>	<b>100</b>	<b>281.988.800</b>
	Penyediaan Sandang	Jumlah kebutuhan Sandang yang disediakan (Orang)	50	49.623.000
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat (Kali)	7	41.527.000
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Kebutuhan Permakanan yang disediakan (Orang)	100	64.178.000
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial diberikan (Orang)	35	63.118.500
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Alat Bantu yang tersedia (Unit)	14	63.542.300
	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial (Persen)</b>	<b>100</b>	<b>225.055.900</b>
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah PMKS yang menerima alat bantu (Orang)	-	-
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah layanan Rujukan (Kali)	2	59.341.800



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (N)	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Pemberian layanan data dan pengaduan bagi klien PMKS melalui Rumah Perlindungan Sosial yang disediakan (Jenis layanan)	-	-
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah PMKS yang mendapatkan Bimbingan sosial (Orang)	80	20.020.300
	Penyediaan Sandang	Jumlah PMKS yang mendapatkan kebutuhan Sandang (Orang)	150	-
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Reunifikasi Keluarga yang diberikan (Orang)	3	49.445.500
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial bagi PMKS (Kali)	7	59.925.500
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Kebutuhan Permakanan yang disediakan bagi PMKS (Orang)	76	27.280.500
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah PMKS yang mendapatkan fasilitasi Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar (Orang)	-	-
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Perbekalan kesehatan diluar panti yang tersedia (Jenis)	-	-
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga dan Kemitraan yang melakukan kerjasama dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (lembaga/mitra)	-	-
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah PMKS yang mendapatkan layanan Kedaruratan (Orang)	-	-



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (N)	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah PMKS yang mendapat fasilitasi Pembuatan Administrasi kependudukan (Orang)	200	9.042.300
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Anak terlantar dan fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial selama satu tahun (%)</b>	<b>100</b>	<b>950.090.545</b>
		<b>persentase pemberian bantuan sosial (%)</b>	<b>100</b>	
		<b>Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang menerima program pemberdayaan sosial</b>	<b>100</b>	
	<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	<b>Persentase Anak Terlantar yang mendapatkan jaminan sosial selama satu tahun (Persen)</b>	<b>100</b>	<b>63.352.750</b>
	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak- anak Terlantar yang mendapat rujukan (Orang)	2	30.053.600
	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Penjangkauan anak-anak terlantar yang dilaksanakan (Kali)	40	16.449.400
	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pengawasan (Anak)	14	16.849.750
	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Jumlah fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (Persen)</b>	<b>100</b>	<b>886.737.795</b>
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah bantuan sosial kesejahteraan Keluarga yang disalurkan (jenis)	1	322.934.000
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Pengelolaan Data Fakir Miskin (Layanan)	1	281.755.800
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemutakhiran basis data terpadu Kesejahteraan sosial (DTKS) yang dilaksanakan (Kali)	2	282.047.995



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (N)	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah kelompok usaha Masyarakat yang difasilitasi (Kelompok)	-	-
	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Persentase Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota (%)</b>	<b>100</b>	<b>830.520.450</b>
	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Perlindungan sosial Bencana Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota (Persen)</b>	<b>100</b>	<b>133.395.500</b>
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat penampungan pengungsi yang disediakan bagi Korban bencana alam dan sosial (Tempat)	2	2.750.000
	Penyediaan Sandang	Jumlah Buffer stock Sandang bagi korban Bencana alam dan sosial yang tersedia (Jenis)	8	10.000.000
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana alam dan Sosial yang mendapatkan Pelayanan dukungan Psikososial (Orang)	50	8.728.500
	Penyediaan Makanan	Jumlah Buffer stock Makanan bagi korban Bencana alam dan sosial yang tersedia (Jenis)	9	10.000.000
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Kelompok Rentan yang terpenuhi Kebutuhan dasarnya (KK)	70	101.917.000
	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota (Persen)</b>	<b>100</b>	<b>697.124.950</b>
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah KSB Terbentuk dan terbinanya (KSB)	4	28.825.450
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang melaksanakan operasional pelayanan dan penanggulangan bencana Kabupaten (Orang)	71	668.299.500



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (N)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	Persentase taman makam pahlawan yang terkelola (Persen)	100	40.588.143
		<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang dipelihara (Persen)	100	40.588.143
		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional yang dipelihara (Taman Makam Nasional)	1	40.588.143
<b>Sasaran Renstra</b>	<b>Terwujudnya kesetaraan gender dan terlaksananya fasilitasi perlindungan perempuan dan anak</b>	<b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>Anugrah Parahita Ekapraya</b>	<b>Pratama</b>	<b>580.926.950</b>
			<b>Kabupaten Layak Anak</b>	<b>Pratama</b>	<b>306.664.000</b>
		<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>Persentase pelaksanaan RAD PUG (Persen)</b>	<b>80</b>	<b>468.737.000</b>
			<b>Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (Persen)</b>	<b>50</b>	
			<b>jumlah IR yang terbina (%)</b>	<b>80</b>	
		<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota (OPD) (Persen)</b>	<b>100</b>	<b>105.706.000</b>
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah perangkat terknis terkait PPRG yang terlatih (Orang)	4	35.000.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen terkait Pelaksanaan PUG (Dokumen)	50	33.200.000
		Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Opd yang mengikuti sosialisasi peraturan dan kebijakan yang terkait dengan PUG (OPD)	32	37.506.000



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (N)	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota (Persen)</b>	100	213.031.000
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan peran perempuan (Peserta)	200	213.031.000
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Rapat Koordinasi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota (Persen)</b>	100	150.000.000
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah IR yang dibina (IR)	50	150.000.000
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah KIE terkait IR (Jenis)	3	-
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif (%)</b>	100	112.189.950
	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Koordinasi terkait Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak (Persen)</b>	100	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan terkait Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (Kali)	7	-



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (N)	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Persentase Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan (Persen)	100	-
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan Perempuan korban kekerasan yang terlayani (Kasus)	10	-
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Persen)</b>	<b>100</b>	<b>112.189.950</b>
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan terkait penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan (Pelatihan/Kegiatan)	2	85.494.950
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah perempuan penerima bantuan (Perempuan)	50	26.695.000
	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Forum anak Desa (Desa)</b>	<b>5</b>	<b>260.700.000</b>
		<b>Jumlah peraturan perundangan dan kebijakan PHPA (Aturan)</b>	<b>3</b>	
	<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Kabupaten Layak Anak (Persen)</b>	<b>100</b>	<b>260.700.000</b>



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (N)	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa layak Anak yang dibina (Desa)	39	-
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kepengurusan Perlindungan Hak Anak (Kepengurusan)	5	260.700.000
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Persen)</b>	<b>39</b>	<b>-</b>
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat koordinasi terkait peningkatan kualitas hidup anak yang dilaksanakan (Kali)	2	-
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang disediakan (Layanan)	1	-
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Persentase anak yang mendapat layanan dalam kategori perlindungan khusus (%)</b>	<b>100</b>	<b>45.964.000</b>
	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (Persen)</b>	<b>100</b>	<b>-</b>



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome) Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (N)	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta sosialisasi terkait peraturan dan kebijakan yang berkenaan dengan perlindungan anak (Peserta)	40	-
	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Persen)</b>	<b>1</b>	<b>24.225.000</b>
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang terlayani (orang)	30	24.225.000
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Persen)</b>	<b>100</b>	<b>21.739.000</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan terkait sarpras pelayanan anak (Kali)	2	21.739.000
<b>TOTAL ANGGARAN</b>				<b>14.819.165.786</b>

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

##### Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024. Selain itu penyusunan RKP juga dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 memuat arah kebijakan nasional tahunan demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

Pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 dinyatakan bahwa RPJMN Tahun 2020–2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 karena menjadi RPJMN tahap akhir dan penentu pencapaian target pembangunan dalam RPJPN Tahun 2005–2025. Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 menjadi tantangan besar terhadap pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2020–2024.

Sesuai arahan RPJPN Tahun 2005–2025, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020–2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam mewujudkan sasaran tersebut, diperlukan upaya yang optimal, peningkatan sinergi pemerintah pusat dan daerah serta penguatan kolaborasi pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan.



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 menjadi acuan penyusunan Visi dan Misi Presiden yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020–2024. Sementara itu, Visi Presiden tahun 2020–2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” sedangkan Misi Presiden tertuang dalam sembilan poin Nawacita yang ditujukan untuk mencapai visi tersebut, yaitu (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; serta (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna meneguhkan dan mempercepat pencapaian tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara serta sebagai peta jalan menuju 100 tahun Indonesia merdeka, Presiden mengamanatkan untuk menyusun Visi Indonesia 2045 yang menjadi bagian integral dari RPJMN Tahun 2020–2024. Upaya pencapaian Visi Indonesia 2045 dimulai pada periode RPJMN Tahun 2020–2024.

### **Tema Pembangunan RKP Tahun 2022**

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2022 dilakukan dengan mempertimbangkan sasaran RPJMN Tahun 2020–2024, arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2020, kebijakan pembangunan tahun 2021, serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian. Tema RKP Tahun 2022 juga disusun sebagai respons terhadap kondisi Indonesia yang sedang berada dalam proses pemulihan akibat pandemi Covid-19. Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 telah berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional, terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih perlu dilakukan pada tahun 2022, dan sekaligus menyiapkan landasan yang kokoh bagi Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020–2024.

Pandemi Covid-19 merupakan *unprecedented shock* yang mengubah secara signifikan pola interaksi antarmanusia, sehingga berimplikasi terhadap perubahan pola aktivitas ekonomi, sosial, serta pelayanan publik. Penerapan *social distancing* dan protokol kesehatan menuntut penggunaan teknologi digital secara intensif dalam mendukung aktivitas manusia. Kondisi demikian tetap akan berlangsung dalam kehidupan era *new normal*, meskipun *herd immunity* diharapkan telah tercapai di tahun 2022.

Berdasarkan hal tersebut, tema pembangunan RKP Tahun 2022 diarahkan untuk pemulihan dampak Covid-19 dengan berorientasi pada membangun ke depan dengan lebih baik (*Build Forward Better*). Adapun tema pembangunan RKP Tahun 2022 adalah "**Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**".

Tema tersebut berfokus pada dua hal yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Pemulihan Ekonomi dapat diterjemahkan sebagai upaya pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha serta diversifikasi ekonomi. Pemulihan daya beli dan dunia usaha yang dilakukan sejalan dengan penuntasan krisis kesehatan, dilakukan melalui pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga, serta percepatan pembangunan infrastruktur padat karya. Selain itu, dilakukan juga program-program khusus untuk mendongkrak kembali daya beli masyarakat dan membangkitkan dunia usaha. Pada saat bersamaan, diversifikasi ekonomi dilakukan melalui program peningkatan nilai tambah, ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, dan pemerataan infrastruktur dan kualitas layanan digital.

### **Sasaran Pembangunan**

Sasaran pembangunan tahun 2022 adalah:

- (1) Percepatan pemulihan ekonomi dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
- (2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia dan (b) tingkat kemiskinan.

Untuk menjaga kesinambungan antara RKP Tahun 2022 dengan RPJMN Tahun 2020–2024, tujuh Agenda Pembangunan RPJMN tetap dipertahankan menjadi tujuh Prioritas Nasional sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2022. Prioritas Nasional tersebut didukung dengan pelaksanaan 45 Proyek Prioritas Strategis/Major Project yang memiliki daya ungkit tinggi dalam mencapai target-target pembangunan.

## **7 (tujuh) Prioritas Nasional, yaitu :**

### **1. Prioritas Nasional 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**

Kebijakan pembangunan pada PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan diarahkan untuk mendukung pemulihan aktivitas produksi, serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder, dan tersier. Pelaksanaannya difokuskan pada beberapa sektro antara lain adalah sebagai berikut: Sektor Pertanian; Industri Pengolahan; Pariwisata; Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm); Serta Didukung Penguatan Reformasi Fiskal; Penguatan Sistem Keuangan; Peningkatan Kualitas Investasi; Peningkatan Ekspor Dan Partisipasi Dalam Rantai Produksi Global; Perbaikan Sistem Logistik; Percepatan Transisi Menuju Energi Baru Dan Terbarukan (EBT); Pemanfaatan Digitalisasi; dan Ekonomi Hijau.

#### Arah kebijakan :

1. Penguatkan pilar pertumbuhan ekonomi dan daya saing ekonomi;
2. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN);
3. Peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor ril dan industrialisasi;
4. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT);
5. Peningkatan kualitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
6. Peningkatan ketersediaan akses dan kualitas produksi pangan;
7. Peningkatan pengelolaan kemaritaman dan kelautan; dan
8. Penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi.

## **2. Prioritas Nasional 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**

Pembangunan wilayah pada tahun 2022 diarahkan untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa, mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan sekaligus meningkatkan pemerataan kualitas hidup antar wilayah.

### Arah kebijakan :

1. Pengembangan wilayah Pulau Papua;
2. Pengembangan wilayah Pulau Maluku;
3. Pengembangan wilayah Pulau Sulawesi;
4. Pengembangan wilayah Pulau Jawa-Bali;
5. Pengembangan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara; dan
6. Pengembangan wilayah Pulau Kalimantan

## **3. Prioritas Nasional 3, Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing**

Pembangunan SDM Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, yang merupakan salah satu prasyarat dalam upaya pemulihan pembangunan akibat pandemi Covid-19. Pembangunan SDM pada tahun 2022 akan ditekankan pada reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, pembangunan Science-Techno Park, serta pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri.

### Arah kebijakan :

1. Peningkatan produktivitas dan daya saing;
- 2. Pengentasan kemiskinan;**
- 3. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;**
4. Pengendalian pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan;
- 5. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;**
6. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; dan
7. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas

#### **4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan diarahkan untuk memperkuat karakter dan sikap mental yang berorientasi pada kemajuan, serta meningkatkan peran kebudayaan sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan dalam percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19

Arah kebijakan :

1. Memperkuat moderasi beragama;
2. Meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreatifitas;
3. Revolusi mental dan pembinaan idiologi Pancasila; dan
4. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan

#### **5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**

Pembangunan infrastruktur tahun 2022 akan mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui program prioritas pada pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi, infrastruktur perkotaan, infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, serta transformasi digital.

Arah kebijakan :

1. Infrastruktur pelayanan dasar;
2. Transformasi digital;
3. Energi dan ketenagalistrikan;
4. Infrastruktur ekonomi; dan
5. Infrastruktur yang mendukung perkotaan.

#### **6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim**

Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim dalam RKP tahun 2022 difokuskan pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih tangguh dan adaptif untuk mendukung pemulihan dan transformasi dampak Covid-19 menuju pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Transformasi pasca pandemi Covid-19 pada pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim akan dititik beratkan pada upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup melalui penanganan limbah B3 dan peningkatan pemantauan kualitas lingkungan secara otomatis; perbaikan sistem ketahanan bencana yang tanggap terhadap bencana yang bersifat seketika (sudden onset) maupun

perlahan (slow onset); serta pelaksanaan pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi rendah emisi gas rumah kaca.

Arah kebijakan :

1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
2. Pembangunan rendah karbon; dan
3. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim.

## **7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**

Pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan diarahkan pada upaya pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Pemulihan ekonomi didorong melalui perbaikan pada sistem hukum ekonomi dan pemberantasan korupsi di tengah pandemi, serta penguatan kerja sama pembangunan internasional untuk pengamanan pasokan vaksin dari negara produsen utama. Hal ini didukung penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di tengah peningkatan respons pertahanan dari beberapa negara di Asia dan keamanan siber. Pada bidang pelayanan publik difokuskan pada penguatan kelembagaan, tata kerja, dan standardisasi penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, tahapan persiapan pemilu akan dimulai dengan verifikasi data Kartu Tanda Penduduk secara online.

Arah kebijakan :

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Menjaga stabilitas keamanan nasional;
3. Reformasi birokrasi dan tata kelola;
4. Optimalisasi kebijakan luar negeri; dan
5. Penegakan hukum nasional.

Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan, maka disusun 10 (sepuluh) strategi pembangunan, yakni :

1. meningkatkan nilai tambah sektor industri;
2. mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata;
3. meningkatkan ketahanan pangan masyarakat;
4. meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional;
5. meningkatkan pemerataan infrastruktur;
6. meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital;



7. meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
8. mempercepat reformasi perlindungan sosial;
9. meningkatkan kualitas SDM dan inovasi; serta
10. memperkuat sistem kesehatan nasional dan penanganan *Covid-19*.

### **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2022**

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengusung tema pembangunan, “**Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Masyarakat Menuju Sumber Daya Manusia Yang Unggul**”, dengan 6 (Enam) Prioritas Pembangunan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

#### **1. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat:**

2. Meningkatkan kapasitas dan layanan kesehatan masyarakat;
3. Meningkatkan Kualitas SDM;
4. Mengembangkan potensi sektor pertanian;
5. Mengembangkan potensi sektor Perikanan dan kelautan;
6. Mengembangkan potensi sektor pariwisata.

Dari tema pembangunan tersebut, akan kita implementasikan melalui program dan kegiatan pembangunan daerah, guna mempercepat pemulihan ekonomi dan kesehatan yang berdasarkan potensi unggulan daerah dengan tetap mengedepankan kebijakan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sesuai amanat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 merupakan upaya untuk mencapai target kinerja utama daerah tahun 2022 yaitu:

1. Pertumbuhan Ekonomi;
2. Tingkat Kemiskinan;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka;
4. Rasio Gini;
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).



## **Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (RKPD) Kabupaten Belitong Timur 2022**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005–2025, dimana pada tahun 2022 merupakan tahapan kelima yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021–2026 dengan visi “ BELITONG TIMUR BANGKIT DAN BERDAYA”.

Berkaitan dengan hal di atas, maka perumusan baik tema dan sasaran pembangunan tahun 2022 disusun dengan mempedomani dokumen perencanaan yang ada, dan memperhatikan isu strategis dan masalah mendesak.

Guna mewujudkan dan mendukung Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Belitong Timur diatas, telah ditetapkan Misi beserta tujuan dan sasaran pembangunan 5 (Lima) tahunan. Tujuan dan sasaran pembangunan pada setiap Misi yang akan memberikan arahan bagi pelaksana setiap urusan Pemerintah Daerah. Rumusan tentang tujuan dan sasaran pembangunan Daerah Kabupaten Belitong Timur tahun 2022 yang berpedoman pada RPJMD.

Prioritas pembangunan Kabupaten Belitong Timur untuk tahun 2022 merupakan tindak lanjut berdasarkan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2020 serta perumusan permasalahan dan tantangan ke depan serta dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD) tahun 2021 – 2026. Prioritas RKPD Kabupaten Belitong Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2. Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat**
3. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah untuk Pengembangan Ekonomi.
4. Pemulihan Stabilitas Ekonomi Melalui Pengembangan Sektor-sektor Prioritas
5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengurangan Resiko Bencana
6. Peningkatan Ketahanan Pangan.

Dengan masih terjadinya pandemi global Covid-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020 dan Tahun 2021, maka tema pembangunan RKP 2022 diarahkan kepada proses pemulihan pembangunan nasional yang terdampak pandemi Covid-19. Berpedoman pada dokumen perencanaan Nasional dan Provinsi, serta RPJMD tahun 2021-2026, , maka perumusan baik tema dan sasaran pembangunan tahun 2022 disusun dengan mempedomani dokumen perencanaan yang ada, dan memperhatikan isu strategis dan masalah mendesak, maka prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Belitong Timur pada Tahun 2022 dilaksanakan dengan tema **“PEMULIHAN EKONOMI DAN KESEHATAN MELALUI PEMBERDAYAAN POTENSI UNGGULAN BERBASIS MASYARAKAT”**,

dengan fokus pembangunan pada:

1. Optimalisasi potensi wilayah;
2. Optimalisasi pengembangan sektor pariwisata;
3. Optimalisasi pengembangan sektor perikanan;
4. Optimalisasi pengembangan sektor pertanian;
5. Optimalisasi pengembangan sektor industri pengolahan;
6. Peningkatan peran UMKM dalam perekonomian daerah;
7. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat;
8. Peningkatan kompetensi tenaga kerja masyarakat;
9. Penumbuhan dan peningkatan semangat kewirausahaan bagi pemuda;
10. Mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertambangan;
11. Mendorong investasi hilirisasi produk pertanian dan perikanan;
12. Peningkatan kualitas infrastruktur untuk pengembangan ekonomi sector prioritas;
13. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana;
14. Peningkatan Ketahanan Pangan;
15. Pengendalian Inflasi Daerah;
16. Peningkatan kerjasama dan sinergi pembangunan antar daerah;
17. Mempercepat realisasi belanja pemerintah;
18. Peningkatan kualitas layanan perizinan dan penanaman modal;
19. Peningkatan kapasitas layanan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE);
20. Peningkatan inovasi daerah.



Sehubungan dengan sinkronisasi prioritas pembangunan dan program/kegiatan OPD yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi OPD, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitong Timur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan yang diberikan, telah melaksanakan program/kegiatan yang diselaraskan dengan Prioritas Nasional, Provinsi dan Daerah.

Sesuai Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Beltim melaksanakan 17 Program, 34 Kegiatan, dan 127 Subkegiatan. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengampu 1 urusan wajib Pelayanan dasar, dan 2 urusan wajib non pelayanan dasar, sebagaimana di rinci pada Tabel 4.4 Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.



Sinkronisasi prioritas pembangunan tahun 2022 sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Tahun 2022**  
(Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 Tahun 2020)

NO	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Prioritas Nasional (PN 3) :</b> Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing  <b>Arah kebijakan :</b> Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; Pengentasan kemiskinan	<b>Prioritas Pembangunan Daerah II (PP 1) :</b> Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat	<b>Prioritas Pembangunan Daerah (PD 2) :</b> Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat	Urusan Sosial			3.378.968.538,00
				1. Program Pemberdayaan Sosial			1.022.625.200,00
					Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		-
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	-
					Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		1.022.625.200
						Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	89.250.000
						Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	69.222.500
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	757.122.000						



NO	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rp
						Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	49.826.700
						Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	57.204.000
				<b>2. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>			<b>40.588.143</b>
					<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>		<b>40.588.143</b>
						Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	40.588.143
				<b>3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</b>			<b>28.099.500</b>
					<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>		<b>28.099.500</b>
						Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	28.099.500



NO	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rp
				<b>4. Program Rehabilitasi Sosial</b>			<b>507.044.700</b>
					<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>		<b>281.988.800</b>
						Penyediaan Sandang	49.623.000
						Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	41.527.000
						Penyediaan Permakanan	64.178.000
						Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	63.118.500
						Penyediaan Alat Bantu	63.542.300
				<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>			<b>225.055.900</b>
						Penyediaan Alat Bantu	-
						Pemberian Layanan Rujukan	59.341.800
						Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	-



NO	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rp
						Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	20.020.300
						Penyediaan Sandang	-
						Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	49.445.500
						Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	59.925.500
						Penyediaan Permakanan	27.280.500
						Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	-
						Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	-
						Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	-
						Pemberian Layanan Kedaruratan	-
						Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	9.042.300
				<b>5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>			<b>950.090.545</b>
					<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>		<b>63.352.750</b>
					Rujukan Anak-Anak Terlantar		30.053.600
					Penjangkauan Anak-Anak Terlantar		16.449.400
					Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar		16.849.750



NO	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rp
					<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>886.737.795</b>
						Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	322.934.000
						Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	281.755.800
						Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	282.047.995
						Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	-
				<b>6. Program Penanganan Bencana</b>			<b>830.520.450</b>
					<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>		<b>133.395.500</b>
						Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	2.750.000
						Penyediaan Sandang	10.000.000
						Pelayanan Dukungan Psikososial	8.728.500
						Penyediaan Makanan	10.000.000
						Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	101.917.000
					<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>		<b>697.124.950</b>
						Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	28.825.450
						Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	668.299.500



NO	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rp
				Urusan Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak			887.590.950
				7. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan			468.737.000
				7. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		105.706.000
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	35.000.000
						Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	33.200.000
						Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	37.506.000
				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			213.031.000
						Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	213.031.000
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			150.000.000



NO	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rp
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000
						Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-
				<b>8. Program Perlindungan Perempuan</b>			<b>112.189.950</b>
					<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>		-
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-
					<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		-
						Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	-
					<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>112.189.950</b>



NO	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rp
						Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	85.494.950
						Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	26.695.000
				<b>9. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</b>			<b>260.700.000</b>
					<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>260.700.000</b>
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	260.700.000
					<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		-
						Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-



NO	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rp
						Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-
				<b>10. Program Perlindungan Khusus Anak</b>			<b>45.964.000</b>
					<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>		-
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-
					<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>24.225.000</b>
						Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.225.000



NO	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rp
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		21.739.000
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.739.000

Sumber data : Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, RKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung, RKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur, Pemetaan Program dan Kegiatan DSPMD Kab. Bellim sesuai Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020

### 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran merupakan turunan atau penjabaran secara operasional yang akan berjalan selaras dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Penjabaran ini nantinya akan menjadi penghubung dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dituangkan dalam bentuk strategi dan arah kebijakan daerah. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai sebuah visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Dalam perencanaan kebijakan, tak terkecuali RPJMD, tahapan perumusan tujuan layaknya titik kritis. Hal tersebut dikarenakan tingkatannya yang tinggi secara prioritas sehingga ikut mempengaruhi penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Secara alur, visi-misi Bupati dan Wakil Bupati untuk periode lima tahun akan menjadi landasan serta dijabarkan kedalam sebuah tujuan untuk dioperasionalkan lewat program-program penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, tercapainya tujuan juga dianggap sebagai impact keberhasilan dari tercapainya program-program yang ditetapkan. Maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitang Timur menentukan arah tujuan dan sasaran sesuai dengan Misi Bupati Kabupaten Belitang Timur yaitu :

**Misi I :** "Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan pemerintah Kabupaten Belitang Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik"

**Tujuan 1 :** Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih maka sasaran – sasaran yang perlu diwujudkan yaitu :

- a. Meningkatnya kapasitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan daerah; dan
- c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

**Tujuan 2 :** Terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien maka sasaran – sasaran yang perlu diwujudkan yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- b. Terwujudnya pelayanan publik berbasis elektronik.

**Tujuan 3 :** Terwujudnya kelembagaan dan manajemen sumber daya aparatur yang efisien

maka sasaran – sasaran yang perlu diwujudkan yaitu :

- a. Meningkatnya efektivitas kelembagaan pemerintah daerah; dan
- b. Meningkatnya profesionalisme sumber daya aparatur.



**Misi III :** “Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Belitong Timur dan pengentasan kemiskinan”

**Tujuan I :** Meningkatnya pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat

maka sasaran – sasaran yang perlu diwujudkan yaitu :

- a. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan;
- b. Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat.

**Tujuan II :** Meningkatnya tingkat pelayanan sarana dan prasarana

maka sasaran – sasaran yang perlu diwujudkan yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah;
- b. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;

**Tujuan III :** Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

maka sasaran – sasaran yang perlu diwujudkan yaitu :

- a. Menurunnya tingkat kemiskinan;
- b. Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial;

Sebagai Dinas yang memiliki peran dalam bidang sosial, Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitong Timur dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan akan melaksanakan 2 (dua) misi dari 3 (tiga) misi yang ada, yaitu misi ke-1 (satu) dan ke-3 (tiga).

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitong Timur mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Belitong Timur 2021-2026.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitong Timur dirumuskan sebagai berikut :

## **1. TUJUAN**

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik;
2. Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (SPBE);
3. Menurunnya tingkat kemiskinan;
4. Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial.

## **2. SASARAN**

1. Terwujudnya Kualitas Pemerintahan Desa dan Masyarakat Perdesaan;
2. Terwujudnya Kualitas dan kuantitas Usaha Ekonomi Perdesaan dan sosial Budaya Masyarakat;
3. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja;
4. Meningkatnya pengelolaan sistem data gender dan anak;



5. Meningkatnya Pelayanan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
6. Berkurangnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
7. Terwujudnya kesetaraan gender dan terlaksananya fasilitasi perlindungan perempuan dan anak;

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja disajikan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Terwujudnya Kualitas Pemerintahan Desa dan Masyarakat Perdesaan	Persentase Desa yang memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan
			Terwujudnya Kualitas dan kuantitas Usaha Ekonomi Perdesaan dan sosial Budaya Masyarakat	Persentase kerjasama antardesa terlaksana dan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Masyarakat Hukum Adat Yang Diberdayakan
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang
2	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Meningkatnya pengelolaan sistem data gender dan anak	Persentase Pengelolaan sistem Data Gender dan anak yang tersedia
3	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan Indeks Keparahan Kemiskinan	Meningkatnya Pelayanan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan
4	Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Berkurangnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
			Terwujudnya kesetaraan gender dan terlaksananya fasilitasi perlindungan perempuan dan anak	Anugrah Parahita Ekapraya
				Kabupaten Layak Anak

### 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Rencana kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPMD) Kabupaten Belitong Timur merupakan penjabaran dari RENSTRA DSPMD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitong Timur serta Tugas Pokok dan Fungsi DSPMD sebagaimana tertuang dalam struktur organisasi dan tata kerja DSPMD yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitong Timur.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan sosial, Bidang Penataan Kerjasama dan Administrasi Pemerintah Desa, Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang secara berjenjang dilaksanakan pada setiap tahun anggaran berjalan mempedomani kepada dokumen yang disepakati dan dibutuhkan daerah.

Sesuai Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, untuk program dan kegiatan terdiri dari 17 Program, 34 Kegiatan, dan 127 Subkegiatan. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mampu 1 urusan wajib Pelayanan dasar, dan 2 urusan wajib non pelayanan dasar.

Seluruh program/kegiatan/subkegiatan ini telah disesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### **PROGRAM DAN KEGIATAN PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

##### **A. PROGRAM RUTIN FUNGSI PENUNJANG (KESEKRETARIATAN)**

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
  - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan



- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - Pengadaan Mebel
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
  - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya



- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan Mebel
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

## **B. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL**

### **1. Pogram Pemberdayaan Sosial**

- Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
- Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
  - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
  - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
  - Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
  - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
  - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

### **2. Pogram Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**

- Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
  - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

### **3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**

- Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
  - Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

#### 4. Program Rehabilitasi Sosial

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
  - Penyediaan Sandang
  - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
  - Penyediaan Permakanan
  - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
  - Penyediaan Alat Bantu
- Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
  - Penyediaan Alat Bantu
  - Pemberian Layanan Rujukan
  - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
  - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
  - Penyediaan Sandang
  - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
  - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
  - Penyediaan Permakanan
  - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
  - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
  - Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
  - Pemberian Layanan Kedaruratan
  - Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak

#### 5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

- Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
  - Rujukan Anak-Anak Terlantar
  - Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
  - Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
  - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
  - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota



- Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

#### **6. Program Penanganan Bencana**

- Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
  - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
  - Penyediaan Sandang
  - Pelayanan Dukungan Psikososial
  - Penyediaan Makanan
  - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
- Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
  - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
  - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

### **C. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

#### **1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

- Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
  - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
  - Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
- Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
  - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
  - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
  - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

#### **2. Program Perlindungan Perempuan**

- Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota



- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
  - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
    - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
  - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
    - Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
- 3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga**
- Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**
- Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
- 5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**
- Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
    - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
    - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
  - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota



- Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

#### **6. Program Perlindungan Khusus Anak**

- Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
  - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

### **D. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

#### **1. Program Penataan Desa**

- Penyelenggaraan Penataan Desa
  - Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
  - Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa
  - Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
  - Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
  - Fasilitasi Tata Wilayah Desa
  - Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota

#### **2. Program Peningkatan Kerjasama Desa**

- Fasilitasi Kerja sama antar Desa
  - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota



- Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

3. **Program Administrasi Pemerintahan Desa**

- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
  - Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
  - Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
  - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
  - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
  - Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
  - Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa
  - Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
  - Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
  - Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
  - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
  - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
  - Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
  - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
  - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
  - Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa
  - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
  - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
  - Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa

4. **Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**

- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
  - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,



- LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
  - Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
  - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
  - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
  - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
  - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat



## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka menunjang Visi, Misi serta Tujuan dan Sasaran Bupati Belitong Timur yang telah ditetapkan. Indikator program (*outcome*) yang direncanakan merupakan kinerja yang harus dicapai oleh masing-masing bidang pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitong Timur. DSPMD Kab. Beltim dalam menyusun rencana kerja tahun 2022 sejalan dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Belitong Timur Tahun 2021-2026 dimana dalam proses penyusunan tersebut, dokumen Rencana Strategis DSPMD juga sedang disusun.

Program/kegiatan yang akan mendukung tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2022, sesuai Permendagri Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitong Timur terdiri dari 17 Program, 34 Kegiatan, dan 127 Subkegiatan. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengampu 1 urusan wajib Pelayanan dasar, dan 2 urusan wajib non pelayanan dasar. Seluruh program/kegiatan/subkegiatan ini telah disesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada penyusunan rancangan awal dan rancangan Renja telah disesuaikan pagu dengan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 dengan total kebutuhan anggaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitong Timur Tahun 2022 sebesar **Rp 14.819.165.786,- (empat belas miliar delapan ratus Sembilan belas juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah)**. Lebih jelas diuraikan sebagai berikut :



**Tabel 4.1**  
**Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022**  
**Dan Prakiraan Maju Tahun 2023**  
**Kabupaten Belitung Timur**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Cata tan Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1																	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																	
1	6										9,921,180,836						14,596,592,674
1	6	1									6,542,212,298						8,969,136,674
1	6	1	02.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							5,100,468,052					5,891,040,600
1	6	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Persentase Pelaporan Keuangan dan Aset yang disusun sesuai standar		100 %	42 Orang	100 %	5,100,468,052	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	100 %	5,891,040,600
1	6	1	02.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>							59,150,000					142,353,750
1	6	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapan yang tersedia	Persentase aparatur yang berkinerja baik		100 %	80 Stel	100 %	33,650,000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	100 %	84,000,000



**RENJA TAHUN 2022**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Cata tan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 6 1 02.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Jumlah pegawai yang mengikuti BIMTEK	Persentase aparatur yang berkinerja baik		100 %	10 Orang	100 %	25,500,000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	100 %	58,353,750
<b>1 6 1 02.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							<b>419,082,500</b>		<b>690,773,265</b>				
1 6 1 02.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		100 %	18 Jenis	100 %	28,496,500	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	100 %	35,910,000
1 6 1 02.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Jumlah peralatan dan Perlengkapan kantor yang diadakan	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		100 %	30 Jenis	100 %	57,675,000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	100 %	80,797,500
1 6 1 02.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		100 %	5 Jenis	100 %	1,887,500			Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	100 %	2,394,000
1 6 1 02.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Tersedia	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		100 %	20 Jenis	100 %	123,732,500	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	100 %	170,168,040



**RENJA TAHUN 2022**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Cata tan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	6	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		100 %	5 Jenis	100 %	26,910,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	100 %	42,403,725	
1	6	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Jumlah Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		100 %	45 Kali	100 %	180,381,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	100 %	359,100,000	
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>02.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>95,848,000</b>				<b>125,661,060</b>		
1	6	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	jumlah mebel	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		100 %	2 Jenis	100 %	27,586,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	100 %	35,910,000	
1	6	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah		100 %	3 Unit	100 %	68,262,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	100 %	89,751,060	



**RENJA TAHUN 2022**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITONG TIMUR**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Cata tan Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumbe r Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>02.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>506,571,000</b>			<b>1,337,945,963</b>		
1	6	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Jumlah layanan Surat Menyurat yang tertangani	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor		100 %	3 Jenis	100 %	130,042,500	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	100 %	163,914,188
1	6	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan lainnya yang terpenuhi	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor		100 %	6 Jenis	100 %	90,780,000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	100 %	128,318,400
1	6	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Kantor		100 %	80 Orang	100 %	285,748,500	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	100 %	1,045,713,375
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>02.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>361,092,746</b>			<b>781,362,036</b>		
1	6	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Laik Jalan	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik		100 %	17 Unit	100 %	327,758,500	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	100 %	446,202,036



**RENJA TAHUN 2022**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Cata tan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.6.1.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam kondisi baik	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik		100 %	6 Unit	100 %	4,834,246	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	100 %	299,250,000
1.6.1.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik		100 %	2 Unit	100 %	28,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	100 %	35,910,000
<b>1.6.2.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>								<b>1,022,625,200</b>					<b>1,339,506,000</b>
<b>1.6.2.02.03</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>1,022,625,200</b>					<b>1,339,506,000</b>
1.6.2.02.03.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	Terlatihnya Pekerja sosial Masyarakat	persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan		100 %	40 Orang	100 %	757,122,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	100 %	798,000,000
1.6.2.02.03.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	Penguatan dan Pembinaan SDM TKSK	persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	Kab. Belitung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 Orang	100 %	89,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	100 %	258,006,000



**RENJA TAHUN 2022**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITONG TIMUR**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Cata tan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	6	2	02.03	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan Sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat	persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan		100 %	4 Kali	100 %	57,204,000		persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	100 %	73,500,000	
1	6	2	02.03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	Terciptanya penguatan bagi kelembagaan sosial Masyarakat	persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan		100 %	55 Lembaga Sosial	100 %	49,826,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	100 %	84,000,000	
1	6	2	02.03	5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	Jumlah Antisipasi penanganan permasalahan/ kasus psikososial keluarga	persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan		100 %	28 Kasus	100 %	69,222,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	100 %	126,000,000	
1	6	3			<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>							<b>28,099,500</b>					<b>73,500,000</b>	
1	6	3	02.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Tiik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal							28,099,500					73,500,000	



**RENJA TAHUN 2022**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITONG TIMUR**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Cata tan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	6	3	02.01	1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang terfasilitasi	Terlaksananya pemulangan warga negara Migran	"Terlaksananya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal"		100 %	5 Orang	100 %	28,099,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang terfasilitasi	100 %	73,500,000
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>4</b>			<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>							<b>507,044,700</b>				<b>1,002,050,000</b>		
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>02.01</b>		<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>							<b>281,988,800</b>				<b>308,000,000</b>		
1	6	4	02.01	1	Penyediaan Permakanan	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang Mendapat Pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	Tersedianya Kebutuhan Permakanan	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial"		100 %	200 Orang	100 %	64,178,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang Mendapat Pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	77,000,000



**RENJA TAHUN 2022**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITONG TIMUR**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Cata tan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	6	4	02.01	2	Penyediaan Sandang	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang Mendapat Pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	tersedianya kebutuhan Sandang	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial"		100 %	200 Orang	100 %	49,623,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang Mendapat Pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	57,750,000
1	6	4	02.01	3	Penyediaan Alat Bantu	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang Mendapat Pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	Tersedianya Alat Bantu	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial"		100 %	1 Paket	100 %	63,542,300			Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang Mendapat Pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	52,500,000
1	6	4	02.01	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang Mendapat Pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	Tersedianya Pemberian Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di		100 %	100 Orang	100 %	63,118,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang Mendapat Pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	68,250,000



**RENJA TAHUN 2022**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Cata tan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1	6	4	02.01	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang Mendapat Pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kepada keluarga	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial"		100 %	7 Kecamatan	100 %	41,527,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang Mendapat Pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	52,500,000
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>02.02</b>		<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>							<b>225,055,900</b>			<b>694,050,000</b>		
1	6	4	02.02	3	Penyediaan Permakanan	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang Mendapat Pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	Tersedianya Kebutuhan Permakanan	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial		100 %	250 Orang	100 %	27,280,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang Mendapat Pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	126,000,000



**RENJA TAHUN 2022**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITONG TIMUR**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Cata tan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	6	4	02.02	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang Mendapat Pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	Terterselenggara Pemberian Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial		100 %	7 Kecamatan	100 %	59,925,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang Mendapat Pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	132,300,000
1	6	4	02.02	8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang Mendapat Pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	Terterselenggara Pemberian Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kepada keluarga	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial		100 %	7 Kecamatan	100 %	20,020,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang Mendapat Pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	147,000,000
1	6	4	02.02	9	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang Mendapat Pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	terselenggara fasilitasi Pembuatan Administrasi kependudukan Bagi PPKS	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di		100 %	1 Layanan	100 %	9,042,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang Mendapat Pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	26,250,000



**RENJA TAHUN 2022**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITONG TIMUR**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Cata tan Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumbe r Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
				Luar Panti Sosial													
1	6	4	02.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang Mendapat Pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	Terlaksananya pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial		100 %	1 Layanan	100 %	49,445,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang Mendapat Pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	157,500,000
1	6	4	02.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang Mendapat Pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	Terlaksananya layanan Rujukan	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial		100 %	1 Layanan	100 %	59,341,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), Keluarga dan Masyarakat yang Mendapat Pelayanan rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	105,000,000
1	6	5			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>							<b>950,090,545</b>		<b>1,650,000,000</b>			
1	6	5	02.01		<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>							<b>63,352,750</b>		<b>137,500,000</b>			



**RENJA TAHUN 2022**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITONG TIMUR**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Cata tan Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumbe r Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	6	5	02.01	1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Persentase Anak terlantar dan fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial selama satu tahun	Terlaksananya Pelayanan dan Perlindungan sosial bagi anak terlantar, anak yang membutuhkan perlindungan khusus dan anak nakal	Persentase Anak Terlantar yang mendapatkan jaminan sosial selama satu tahun		100 %	30 Orang	100 %	16,449,400	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Anak terlantar dan fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial selama satu tahun	100 %	33,000,000	
1	6	5	02.01	2	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Persentase Anak terlantar dan fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial selama satu tahun	Terlaksananya Rujukan Anak- anak Terlantar	Persentase Anak Terlantar yang mendapatkan jaminan sosial selama satu tahun		100 %	10 Orang	100 %	30,053,600	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Anak terlantar dan fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial selama satu tahun	100 %	77,000,000	
1	6	5	02.01	3	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Persentase Anak terlantar dan fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial selama satu tahun	Termuktahirnya basis data terpadu Kesejahteraan sosial (DTKS)	Persentase Anak Terlantar yang mendapatkan jaminan sosial selama satu tahun		100 %	2 Kali	100 %	16,849,750	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Anak terlantar dan fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial selama satu tahun	100 %	27,500,000	
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>02.02</b>		<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>886,737,795</b>					<b>1,512,500,000</b>	
1	6	5	02.02	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	persentase pemberian bantuan sosial	Termuktahirnya basis data terpadu Kesejahteraan sosial (DTKS)	Persentase Jumlah fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial		100 %	2 Kali	100 %	282,047,995	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	persentase pemberian bantuan sosial	100 %	399,000,000	



**RENJA TAHUN 2022**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITONG TIMUR**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Cata tan Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
		Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang menerima program pemberdayaan sosial				100 %							Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang menerima program pemberdayaan sosial	100 %			
1	6	5	02.02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	persentase pemberian bantuan sosial	Tersedianya Aplikasi	Persentase Jumlah fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial		100 %	1 Aplikasi	100 %	281,755,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	persentase pemberian bantuan sosial	100 %	200,000,000
					Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang menerima program pemberdayaan sosial					100 %				Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang menerima program pemberdayaan sosial	100 %		
1	6	5	02.02	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	persentase pemberian bantuan sosial	Tersedianya anggaran bantuan sosial kesejahteraan Keluarga	Persentase Jumlah fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial		100 %	450 Orang	100 %	322,934,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	persentase pemberian bantuan sosial	100 %	913,500,000



**RENJA TAHUN 2022**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITONG TIMUR**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Cata tan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
		Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang menerima program pemberdayaan sosial				100 %							Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang menerima program pemberdayaan sosial	100 %			
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>6</b>		<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>						<b>830,520,450</b>			<b>1,517,250,000</b>				
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>02.01</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>						<b>133,395,500</b>			<b>519,750,000</b>				
1	6	6	02.01	1	Penyediaan Makanan	Persentase Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Tersedianya Buffer stock Makanan bagi korban Bencana	Persentase Perlindungan sosial Bencana Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		100 %	14 Paket	100 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100 %	157,500,000
1	6	6	02.01	2	Penyediaan Sandang	Persentase Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Tersedianya Buffer stock Sandang bagi korban Bencana	Persentase Perlindungan sosial Bencana Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		100 %	9 Paket	100 %	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100 %	105,000,000



**RENJA TAHUN 2022**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITONG TIMUR**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Cata tan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	6	6	02.01	3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Persentase Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Tersedianya Tempat pengungsian bagi Korban bencana alam dan sosial	Persentase Perlindungan sosial Bencana Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota"		100 %	2 Tempat	100 %	2,750,000		Persentase Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100 %	63,000,000	
1	6	6	02.01	4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Persentase Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Tersedianya Kebutuhan dasar bagi kelompok Rentan	Persentase Perlindungan sosial Bencana Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota"		100 %	1 Kelompok	100 %	101,917,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100 %	63,000,000	
1	6	6	02.01	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Persentase Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Tersedianya Pelayanan dan dukungan Psikososial	Persentase Perlindungan sosial Bencana Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota"		100 %	150 Orang	100 %	8,728,500		Persentase Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100 %	131,250,000	
1	6	6	02.02		<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>							<b>697,124,950</b>					<b>997,500,000</b>	



**RENJA TAHUN 2022**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Cata tan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 6 6 02.02 1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Persentase Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Terbentuk dan terbinanya KSB	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/kota		100 %	39 KSB	100 %	28,825,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100 %	105,000,000
1 6 6 02.02 2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Terselenggara operasional pelayanan dan penanggulangan bencana Kabupaten	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/kota		100 %	71 Orang	100 %	668,299,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100 %	892,500,000
<b>1 6 7</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>								<b>40,588,143</b>					<b>45,150,000</b>
<b>1 6 7 02.01</b>	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>								<b>40,588,143</b>					<b>45,150,000</b>
1 6 7 02.01 1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase taman makam pahlawan yang terkelola	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		100 %	1 Taman Makam Nasional	1 Taman Makam Nasional	40,588,143	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase taman makam pahlawan yang terkelola	100 %	45,150,000
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>													
<b>2 8</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>								<b>1,064,684,950</b>					<b>1,987,500,000</b>
<b>2 8 2</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>								<b>468,737,000</b>					<b>735,000,000</b>
2 8 2 02.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota								105,706,000					367,500,000



**RENJA TAHUN 2022**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Cata tan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	8	2	02.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	jumlah IR yang terbina	terlaksananya koordinasinya dan sinkronisasi terkait pelaksanaan PUG	Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kotora		50 %	32 OPD	32 OPD	33,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	jumlah IR yang terbina	50 %	105,000,000
						Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah				50 %					Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	50 %	
						Persentase pelaksanaan RAD PUG				80 %					Persentase pelaksanaan RAD PUG	80 %	
2	8	2	02.01	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	jumlah IR yang terbina	terlatihnya perangkat teknis terkait PPRG (jumlah peserta)	Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kotora		50 %	32 OPD	32 OPD	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	jumlah IR yang terbina	50 %	210,000,000
						Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah				50 %					Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	50 %	
						Persentase pelaksanaan RAD PUG				80 %					Persentase pelaksanaan RAD PUG	80 %	



**RENJA TAHUN 2022**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITONG TIMUR**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Cata tan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	8	2	02.01	4	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	jumlah IR yang terbina	tersosialisasikan peraturan atau kebijakan yang terkait dengan PUG	Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		50 %	32 OPD	32 OPD	37,506,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	jumlah IR yang terbina	50 %	52,500,000
						Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah				50 %					Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	50 %	
						Persentase pelaksanaan RAD PUG				80 %					Persentase pelaksanaan RAD PUG	80 %	
<b>2</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>02.02</b>		<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>						<b>213,031,000</b>			<b>210,000,000</b>			
2	8	2	02.02	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	jumlah IR yang terbina	tersosialisasikan aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan peran perempuan	"Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota"		80	2 Kegiatan Hari Besar	2 Hari Besar perempuan	213,031,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	jumlah IR yang terbina	80	210,000,000
						Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah				50 %					Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	50 %	



**RENJA TAHUN 2022**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITONG TIMUR**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Cata tan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
		Persentase pelaksanaan RAD PUG				80 %						Persentase pelaksanaan RAD PUG	80 %				
<b>2</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>02.03</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>						<b>150,000,000</b>				<b>157,500,000</b>			
2	8	2	02.03	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah IR yang terbina	jumlah IR yang dibina	terlaksananya Rapat Koordinasi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota		80 %	50 IR	3 Raker	150,000,000		jumlah IR yang terbina	80 %	157,500,000
						Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah				50 %					Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	50 %	
						Persentase pelaksanaan RAD PUG				80 %					Persentase pelaksanaan RAD PUG	80 %	
<b>2</b>	<b>8</b>	<b>3</b>			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>						<b>112,189,950</b>			<b>262,500,000</b>			
2	8	3	02.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						112,189,950			262,500,000			



**RENJA TAHUN 2022**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITONG TIMUR**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Cata tan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 8 3 02.03 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	terlatihnya SDM terkait penanganan bagi perempuan korban kekerasan	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 %	39 Orang	2 Raker	85,494,950			Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	100 %	105,000,000
2 8 3 02.03 3	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	jumlah perempuan penerima bantuan	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 %	50 Perempuan	2 Raker	26,695,000			Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	100 %	157,500,000
<b>2 8 4</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>								<b>27,094,000</b>					<b>157,500,000</b>
<b>2 8 4 02.03</b>	<b>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>27,094,000</b>					<b>157,500,000</b>
2 8 4 02.03 1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang terlayani	Jumlah Keluarga yang terlayani (keg puspaga)	Jumlah Keluarga yang terlayani		50 Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	27,094,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Keluarga yang terlayani	50 Keluarga	157,500,000



**RENJA TAHUN 2022**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITONG TIMUR**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Cata tan Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
<b>2</b>	<b>8</b>	<b>5</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>									<b>150,000,000</b>			
2	8	5	02.01		<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>									<b>150,000,000</b>			
2	8	5	02.01	1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen data gender yang tersedia	terlaksananya rapat koordinasi gugus tugas KLA	Jumlah Dokumen data gender yang tersedia		1 Dokumen	4 rakor	1 Dokumen	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen data gender yang tersedia	1 Dokumen	150,000,000
<b>2</b>	<b>8</b>	<b>6</b>			<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>									<b>210,000,000</b>			
2	8	6	02.01		<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>									<b>210,000,000</b>			
2	8	6	02.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Forum anak Desa	Terbentuk dan Terbinanya Kepengurusan Forum Anak Desa	Terlaksananya Kabupaten Layak Anak		5 Desa	5 Kepengurusan	39 Desa	260,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Forum anak Desa	5 Desa	210,000,000
				Jumlah peraturan perundangan dan kebijakan PHPA					3 Aturan			Jumlah peraturan perundangan dan kebijakan PHPA			3 Aturan		
<b>2</b>	<b>8</b>	<b>7</b>			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>									<b>45,964,000</b>			
2	8	7	02.02		<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>									<b>24,225,000</b>			



**RENJA TAHUN 2022**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Cata tan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	8	7	02.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak yang mendapat layanan dalam kategori perlindungan khusus	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 %	1 Layanan	1 Layanan	24,225,000		Persentase anak yang mendapat layanan dalam kategori perlindungan khusus	100 %	210,000,000	
<b>2</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>02.03</b>		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>21,739,000</b>				<b>262,500,000</b>		
2	8	7	02.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak yang mendapat layanan dalam kategori perlindungan khusus	Tersedianya sarpras untuk pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	"Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota"		100 %	1 Jenis	1 Layanan	21,739,000		Persentase anak yang mendapat layanan dalam kategori perlindungan khusus	100 %	262,500,000	
<b>2</b>	<b>13</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>							<b>3,833,300,000</b>				<b>4,651,474,747</b>		
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>2</b>			<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>							<b>60,000,000</b>				<b>104,684,947</b>		
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>02.01</b>		<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>							<b>60,000,000</b>				<b>104,684,947</b>		
2	13	2	02.01	2	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Persentase usulan penataan desa yang ditindaklanjuti	Terfasilitasinya Tata wilayah Desa	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Desa (Desa)		100 %	39 Desa	39 Desa	30,000,000		Persentase usulan penataan desa yang ditindaklanjuti	100 %	47,355,000	



**RENJA TAHUN 2022**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITONG TIMUR**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Cata tan Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 13 2 02.01 3	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Persentase usulan penataan desa yang ditindaklanjuti	Terfasilitasinya Penataan Kewenangan Desa	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Desa (Desa)		100 %	39 Desa	39 Desa	30,000,000			Persentase usulan penataan desa yang ditindaklanjuti	100 %	57,329,947
<b>2 13 3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>								<b>70,000,000</b>					<b>157,500,000</b>
<b>2 13 3 02.01</b>	<b>Fasilitasi Kerja sama antar Desa</b>								<b>70,000,000</b>					<b>157,500,000</b>
2 13 3 02.01 1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Persentase kerjasama antardesa terlaksana	Terfasilitasinya Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa		100 %	39 Desa	39 Desa	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kerjasama antardesa terlaksana	100 %	105,000,000
2 13 3 02.01 2	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Persentase kerjasama antardesa terlaksana	Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa		100 %	39 Desa	39 Desa	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kerjasama antardesa terlaksana	100 %	52,500,000
<b>2 13 4</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>								<b>2,877,673,000</b>					<b>2,992,789,800</b>
<b>2 13 4 02.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>								<b>2,877,673,000</b>					<b>2,992,789,800</b>
2 13 4 02.01 1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan	Terfasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		100 %	39 Desa	39 Desa	800,000,000			Persentase desa yang memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan	100 %	724,789,800



**RENJA TAHUN 2022**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Cata tan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 13 4 02.01 2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Persentase desa yang memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan	Terfasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		100 %	39 Desa	39 Desa	40,000,000			Persentase desa yang memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan	100 %	105,000,000
2 13 4 02.01 4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa yang memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan	Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		100 %	39 Desa	39 Desa	100,000,000			Persentase desa yang memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan	100 %	210,000,000
2 13 4 02.01 5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase desa yang memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan	Terbinanya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		100 %	39 Desa	39 Desa	120,000,000			Persentase desa yang memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan	100 %	315,000,000
2 13 4 02.01 6	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Persentase desa yang memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		100 %	39 Desa	39 Desa	55,000,000			Persentase desa yang memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan	100 %	105,000,000



**RENJA TAHUN 2022**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITONG TIMUR**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Cata tan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 13 4 02.01 7	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Persentase desa yang memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan	Terlaksananya evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		100 %	39 Desa	39 Desa	35,000,000			Persentase desa yang memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan	100 %	105,000,000
2 13 4 02.01 8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Persentase desa yang memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan	Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan Bum Desa dan Bum Desa Bersama	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		100 %	39 Desa	39 Desa	140,373,000			Persentase desa yang memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan	100 %	241,500,000
2 13 4 02.01 9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Persentase desa yang memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		100 %	39 Desa	39 Desa	1,560,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase desa yang memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan	100 %	1,050,000,000
2 13 4 02.01 10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Persentase desa yang memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan	Terfasilitasinya Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		100 %	39 Desa	39 Desa	12,000,000			Persentase desa yang memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan	100 %	105,000,000



**RENJA TAHUN 2022**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITONG TIMUR**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Cata tan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	13	4	02.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Persentase desa yang memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan	terfasilitasinya Penyusunan Profil Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		100 %	39 desa	39 Desa	15,000,000		Persentase desa yang memenuhi kelengkapan administrasi pemerintahan	100 %	31,500,000	
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>5</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>							<b>825,627,000</b>				<b>1,396,500,000</b>		
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>02.01</b>		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>825,627,000</b>				<b>1,396,500,000</b>		
2	13	5	02.01	2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Yang Diberdayakan	Jumlah Posyandu yang dibina	"Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		100 %	39 Desa	39 Desa	30,000,000		Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Yang Diberdayakan	100 %	157,500,000	



**RENJA TAHUN 2022**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITONG TIMUR**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Cata tan Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumbe r Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
		"Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				39 Desa						"Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	39 Desa				
2	13	5	02.01	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Yang Diberdayakan	Terlaksananya a Pelatihan tentang penataan kelembagaa n Desa	"Terlaksananya Pemberdayaa n Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaa n Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a serta Pemberdayaa n Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat		100 %	39 Desa	39 Desa	40,000,000		Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Yang Diberdayakan	100 %	157,500,000



**RENJA TAHUN 2022**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITONG TIMUR**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Cata tan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
				Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota														
		"Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				39 Desa							"Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	39 Desa				
2	13	5	02.01	5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Yang Diberdayakan	Desa mendapatkan fasilitasi dalam pengembangan Usaha Ekonomi Produktif	"Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 %	39 Desa	39 Desa	44,762,700			Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Yang Diberdayakan	100 %	189,000,000



**RENJA TAHUN 2022**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITONG TIMUR**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Cata tan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
				a serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota													
		"Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				39 Desa							"Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	39 Desa			
2	13	5	02.01	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Terfasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam	"Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di		100 %	7 Kecamatan	39 Desa	140,000,000		Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	100 %	262,500,000



**RENJA TAHUN 2022**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITONG TIMUR**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Yang Diberdayakan	dan Teknologi Tepat Guna	Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota								Yang Diberdayakan		
		"Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				39 Desa						"Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	39 Desa	



**RENJA TAHUN 2022**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITONG TIMUR**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Cata tan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	13	5	02.01	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Yang Diberdayakan	Terfasilitasinya Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	"Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		100 %	1 Tim	39 Desa	570,864,300		Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Yang Diberdayakan	100 %	630,000,000	
					"Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang					39 Desa					"Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat	39 Desa		



**RENJA TAHUN 2022**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Cata tan Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/  Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an				Tolok Ukur	Target	
		Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota										Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		
<b>TOTAL</b>									<b>14,819,165,786</b>					<b>21,235,567,421</b>

## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitang Timur ini merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 tahun ke depan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang didalamnya memuat program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitang Timur disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah kembali di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitang Timur Tahun 2021-2026 serta dokumen pendukung lainnya.

Demikian Rencana Kerja ini disusun, diharapkan dengan adanya Renja Kerja ini Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitang Timur dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Belitang Timur,



**JDA LISMAWATI, S.Sos, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19711102 200112 2 003

**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur  
Tahun 2022**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.		√		Tidak ada Usulan dari Masyarakat
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.		√		Tidak ada Usulan dari Kecamatan
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	√			

Manggar, Juli 2021

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR



IDA LISMAWATI, S.Sos, M.Si  
Pembina Tk. I

NIP. 19711102 200112 2 003

















**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

*Komplek Pekantoran Terpadu Jl. Raya Manggar – Gantung, Belitong Timur*

*Jl. Raya Gantung Dsn Manggarawan - Desa Padang Kec. Manggar Kode Pos 33516*

*Email: [dinsospmbelitim@gmail.com](mailto:dinsospmbelitim@gmail.com) – Telp/Fax : ( 0719-9220039)*

---

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
DESA KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

NOMOR: 188.4/ 84.a /DSPMD/ TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PADA DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2022

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pernerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2022 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas dan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2022 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitong Timur;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 85);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 17);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 18);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 19); dan;
30. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43);

31. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 28).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TENTANG RENJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2022 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun agenda kerja;
  2. Merumuskan tujuan dan sasaran;
  3. Merumuskan kegiatan prioritas; dan
  4. Merumuskan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah;
  5. Melakukan penelaahan terhadap rancangan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2022;
  6. Menyajikan rancangan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2022;
  7. Melakukan pembahasan pada forum perangkat daerah;
  8. Menyempurnakan rancangan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2022 berdasarkan hasil forum perangkat daerah dan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait SPM;
  9. Menyusun rancangan akhir penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2022.
  10. Menyiapkan administrasi penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2022;
  11. Menyiapkan dokumen penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2022; dan
  12. Melakukan pengolahan data dan informasi.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata kekeliruan dalam penetapan maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal, 7 Juli 2021

KEPALA DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
DESA, KABUPATEN BELITUNG TIMUR



**IDA RISMAWATI, S.Sos, M. Si**  
**Pembina Tk. I**

**NIP. 19711102 200112 2 003**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
DESA KAB. BELITUNG TIMUR

NOMOR : 184.4/ 84.a /DSPMD/2021

TANGGAL : 7 Juli 2021

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022  
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

- I. Ketua : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur
- II. Sekretaris : Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur.
- III. Anggota : 1. Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial;  
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial;  
3. Kepala Bidang Penataan, Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa;  
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan  
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
6. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan  
7. Kepala Sub Bagian Keuangan  
8. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
9. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial  
10. Kepala Seksi Perlindungan Korban Bencana Sosial dan Alam  
11. Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga  
12. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin  
13. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil  
14. Kepala Seksi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial  
15. Kepala Seksi Penataan Desa

16. Kepala Seksi Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa
17. Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat
18. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kemasyarakatan
19. Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender
20. Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga
21. Kepala Seksi Perlindungan Hak Anak dan Sistem Data Gender

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR



**IDA LISMAWATI, S.Sos, M.Si**  
**Pembina Tk. I**

**NIP. 19711102 200112 2 003**



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

*Komplek Pekantoran Terpadu Jl. Raya Manggar – Gantung, Belitong Timur*

*Jl. Raya Gantung Dsn Manggarawan - Desa Padang Kec. Manggar Kode Pos 33516*

*Email: [dinsospmdbelitim@gmail.com](mailto:dinsospmdbelitim@gmail.com) – Telp/Fax : ( 0719-9220039)*

---

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
DESA KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

NOMOR: 188.4/ 94.c /DSPMD/ TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITUNG  
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi, Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Perlu disusun Rencana Kerja (RENJA) OPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitong Timur Tahun 2022;
- b. bahwa penetapan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitong Timur tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitong Timur;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 85);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 17);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 18);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 19); dan;
30. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43);

31. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 28).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TENTANG RENJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur tahun 2022, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah hasil kerja Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur tahun 2022 sebagai dokumen perencanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2022
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal, 9 Agustus 2021

KEPALA DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
DESA KABUPATEN BELITUNG TIMUR



**IDA LISMAWATI, S.Sos, M. Si**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19711102 200112 2 003**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Belitung Timur;
2. Inspektur Kabupaten Belitung Timur;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. Arsip.